

BAB IV

DESKRIPSI DATA, PEMBUKTIAN HIPOTESIS, PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Objek

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Fokus kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPRS meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mulai populer sejak diberlakukannya UU no.10 tahun 1998 yang mempertegas adanya sistem perbankan syariah di Indonesia.

Pada tahun 1991-1998, hanya terdapat beberapa BPRS yang berdiri sebagai bagian dari industri perbankan syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang pertama kali didirikan yaitu BPRS Dana Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Amanah Rabbaniah. Sejak pemberlakuan UU no.10 tahun 1998, perkembangan BPRS semakin meningkat pesat yang mana pada tahun 2005 terdapat 13 BPRS hingga pada tahun 2017 mencapai 167 BPRS di Indonesia.

Adapun gambaran umum BPRS di Indonesia yang menjadi sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

a. PT BPRS Amanah Rabbaniah

BPRS Amanah Rabbaniah didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 27 tanggal 9 Juli 1990 oleh Notaris Masri Husen, SH. Pada tanggal 24 Oktober

1991, BPRS Amanah Rabbaniah telah mendapat izin operasi sesuai izin operasional Menteri Keuangan RI melalui SK Menteri Keuangan RI no: KEP.281/KM.13/1991 tentang pemberian izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Amanah Rabbaniah. Setelah beroperasi 30 tahun, total aset BPRS Amanah Rabbaniah per Maret 2021 sebesar Rp97.145.999.000,00.

b. PT BPRS Amanah Ummah

Pembentukan BPRS Amanah Ummah diawali pembentukan tim penyusun proposal pendirian Bank Syariah kemudian diajukan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia. Mulai beroperasi pada tanggal 11 Juli 1992 setelah diterbitkan izin operasional usaha bank pada tanggal 18 Mei 1992. Setelah beroperasi 29 tahun, total aset BPRS Amanah Ummah per Maret 2021 sebesar Rp328.177.291.000,00.

c. PT BPRS Artha Karimah Irsyadi

BPRS Artha Karimah Irsyadi mulai beroperasi setelah diterbitkan izin operasional SK Departemen Keuangan Republik Indonesia Kep-060/KM.17/1992 09 Nopember 1992 berdasarkan Akta Notaris no. 22 tanggal 22 Juni 1992 Notaris Anis Husin Abdat, SH., di Jakarta. BPRS Artha Karimah Irsyadi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp25.000.000.000,00 serta modal yang disetor sebesar Rp15.815.200.000,00. Setelah beroperasi selama 29 tahun, total aset BPRS Artha Karimah Irsyadi per Maret 2021 sebesar Rp67.062.402.000,00.

d. PT BPRS Mentari

BPRS Mentari didirikan pada tahun 1991 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 28 Januari 1993. Pada awal didirikan, BPRS Mentari

berdiri dengan modal dasar sebesar Rp10.000.000.000,00. Setelah didirikan selama 30 tahun, BPRS Mentari memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp105.489.835.000,00.

e. PT BPRS Baiturridha Pusaka

BPRS Baiturridha didirikan berdasarkan kepedulian dari pemilik Hotel Panghegar *Group*. Setelah BPRS Baiturridha Pusaka beroperasi, sejak tahun 2008, BPRS Baiturridha diakuisisi oleh Yayasan Pusaka hingga pada tahun 2010 terjadi pergantian logo serta nama menjadai BPRS Baiturridha Pusaka. BPRS Baiturridha Pusaka beroperasi secara syariah dan telah memiliki total aset Rp129.955.111.000,00 per Maret 2021.

f. PT Harta Insan Karimah

BPRS Harta Insan Karimah didirikan oleh alumni Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (HMI FEUGM) di Jakarta berdasarkan modal awal sebesar Rp10.000.000.000,00. Berdirinya BPRS Harta Insan Karimah berdasarkan Akte Notaris Yudho Paripurno, SH, di Jakarta terakhir dengan Akte Perubahan Nomor 13 tanggal 24 Januari 2007 dan mulai beroperasi setelah terbit izin operasional SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177KM171993, tanggal 28 Agustus 1993. Setelah 28 beroperasi dengan modal awal sebesar Rp10.000.000.000,00, total aset BPRS Harta Insan Karimah per Maret 2021 sebesar Rp623.305.418.000,00.

g. PT BPRS Barkah Gemadana

BPRS Barkah Gemadana diresmikan oleh Ir. H. Muhammad said (Gubernur KDH Tk 1 Kalimantan Selatan) pada tanggal 5 Oktober 1993

berdasarkan izin operasional Menteri Keuangan RI Nomor KEP-186/KM.17/1993 tanggal 3 September 1993 dan Akta pendirian Robensyah Sjachan, SH. Notaris di Banjarmasin nomor 45 tanggal 19 Juni 1992. Setelah beroperasi selama 28 tahun, BPRS Barkah Gemadana memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp78.018.670.000,00.

h. PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi

BPRS Harta Insan Karimah Bekasi mulai beroperasi sejak tanggal 15 Mei 2005. BPRS Harta Insan Karimah Bekasi merupakan salah satu bagian dari grup Harta Insan Karimah (Grup HIK) yang telah didirikan pada tahun 1993 serta mempunyai total aset lebih dari tiga triliun rupiah. Setelah beroperasi selama 16 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Harta Insan Karimah Bekasi per Maret 2021 sebesar Rp285.624.168.000,00.

i. PT BPRS Margirizki Bahagia

BPRS Margirizki Bahagia didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1992 dengan modal awal sebesar Rp1.000.000.000,00 dan modal disetor Rp250.000.000,00. BPRS Margirizki Bahagia baru mulai beroperasi pada tanggal 8 Januari 1994 sesuai SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. C24555 HT.01 Tahun 1993 dan akta notaris Umar Syamhudi, SH. pada tanggal 25 Juli 1992. Setelah beroperasi selama 28 tahun, BPRS Margirizki Bahagia memiliki total aset sebesar Rp42.112.810.000,00 per Maret 2021.

j. PT BPRS Bangun Drajat Warga

BPRS Bangun Drajat Warga didirikan secara resmi pada tanggal 2 Februari 1994 berdasarkan akta notaris Muhammmad Agus Hanafi, SH sesuai No. 33 tanggal 24 Februari 1993 sesuai izin operasional no. 275/KM17/1993. BPRS Bangun Drajat Warga didirikan dengan modal awal sebesar Rp5.000.000.000,00 setara dengan 500.000 lembar saham dengan nominal Rp10.000,00 per lembar saham. Setelah resmi beroperasi selama 27 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Bangun Drajat Warga sejumlah Rp147.063.599.000,00 per Maret 2021.

k. PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung

BPRS Harta Insan Karimah Cibitung berkedudukan di Bekasi yang berdiri sesuai Akta Pendirian no. 201 tanggal 24 Agustus 1993 dengan modal awal sebesar Rp100.000.000.000,00. Dengan modal awal tersebut, total aset yang dimiliki oleh BPRS Harta Insan Karimah Cibitung per Maret 2021 sebesar Rp285.624.168.000,00.

l. PT. BPRS PNM Patuh Beramal

BPRS PNM Patuh Beramal berlokasi di Jl. Sandubaya Blok U No. 35 Kompleks Pertokoan Bertais Cakranegara Mataram. BPRS PNM Patuh Beramal didirikan berdasarkan akta pendirian No.42 tanggal 23 Oktober 1992 dengan Notaris Abdullah, S.H. BPRS PNM Patuh Beramal mulai beroperasi setelah adanya penerbitan izin prinsip dari Departemen Keuangan No.Kep—19/KM.17/1994 tanggal 5 Februari 1994. Setelah lama beroperasi, BPRS PNM Patuh Beramal memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp73.753.483.000,00.

m. PT BPRS Baktimakmur Indah

BPRS Baktimakmur Indah didirikan oleh para tokoh dengan dasar niat berjihad di bidang ekonomi islam. Dengan adanya niat tinggi, maka secara resmi BPRS Baktimakmur Indah secara resmi dan langsung diresmikan oleh Menteri Keuangan RI yaitu Bapak H. Mar'ie Muhammad. Setelah resmi beroperasi, BPRS Baktimakmur Indah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp151.565.025.000,00.

n. PT BPRS Baiturrahman

BPRS Baiturrahman secara resmi beroperasi pada tanggal 15 April 1994 dengan 16 orang pemegang saham hingga saat ini kuantitas pemegang saham telah meningkat hingga melebihi angka 100. Setelah beroperasi selama 27 tahun, BPRS Baiturrahman memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp51.409.195.000,00.

o. PT BPRS AlMasoem

BPRS AlMasoem didirikan secara resmi pada tanggal 30 September 1993 sesuai akta pendirian no.23 oleh notaris Gina Riswara Koswara, S.H. BPRS AlMasoem mulai beroperasi secara resmi setelah penerbitan surat izin usaha dari Departemen Keuangan RI no. Kep/130/km.17/1994, tertanggal 30 Mei 1994. Setelah beroperasinya BPRS AlMasoem, total aset yang dimiliki oleh BPRS AlMasoem per Maret 2021 yaitu sebesar Rp253.631.455.000,00.

p. PT BPRS Dana Moneter

BPRS Dana Moneter berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. BPRS Dana Moneter secara resmi beroperasi pada tanggal 7 Juli 2008. Setelah

beroperasi selama 13 tahun, BPRS Dana Moneter mampu mendapatkan total aset per Maret 2021 sebesar Rp45.003.832.000,00.

q. PT BPRS Amanah Bangsa

BPRS Amanah Bangsa mulai berdiri pada tanggal 7 Oktober 1992 dengan modal awal sebesar lima puluh juta rupiah berdasarkan akta pendirian no. 12 oleh notaris Adlin, S.H di Pematang Siantar. BPRS Amanah Bangsa memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 September 1994 sesuai penerbitan surat izin usaha oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia no. KEP-186/KM.17/1994 tertanggal 12 Juli 1994. Setelah 29 tahun beroperasi, BPRS Amanah Bangsa memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp72.500.563.000,00.

r. PT BPRS Asri Madani Nusantara

BPRS Asri Madani Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. BPRS Asri Madani Nusantara secara resmi beroperasi pada tanggal 14 Oktober 1994. Pada periode bulan Maret 2021, BPRS Asri Madani Nusantara tercatat memiliki total aset sebesar Rp17.800.592.000,00.

s. PT BPRS Muamalah Cilegon

BPRS Muawanah merupakan nama awal sebelum adanya perubahan nama dari BPRS Muamalah Cilegon. BPRS Muamalah Cilegon didirikan pada tanggal 23 Agustus 1994 berdasarkan akta pendirian no. 5806 tahun 1994 oleh Notaris Muhamad Toha, S.H. Adapun total aset yang dimiliki oleh BPRS Muamalah Cilegon per Maret 2021 yaitu sebesar Rp50.497.759.000,00.

t. PT BPRS Al Washliyah

BPRS Al Washliyah merupakan salah satu BPRS yang berlokasi di Sumatera Utara yang mana secara resmi beroperasi pada tanggal 8 November 1994. Setelah beroperasi selama 27 tahun, BPRS Al Washliyah memiliki aset sebesar Rp12.897.476.000,00.

u. PT BPRS Attaqwa

BPRS Attaqwa mulai beroperasi secara resmi setelah adanya penerbitan izin dan keputusan menteri keuangan no. Kep-286/KM.17/1994 yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan Akta Pendirian No. 99 Tanggal 10 Juni 1994 oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. Setelah diresmikan beroperasi sejak tahun 1994, BPRS Attaqwa memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp52.938.189.000,00.

v. PT BPRS Al Falah

BPRS Al Falah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 1995 berdasarkan akta no.2 tanggal 7 Januari 1994 oleh notaris Aminus di Palembang. BPRS Al Falah merupakan salah satu BPRS yang berlokasi di kabupaten Banyuasin. Setelah 26 tahun beroperasi, BPRS Al Falah memiliki total aset sebesar Rp24.214.135.000,00.

w. PT BPRS Hasanah

PT BPRS Hasanah mulai beroperasi pada tanggal 11 April 1995 yang mana PT BPRS Hasanah merupakan pelopor bank syariah di Provinsi Riau. PT BPRS Hasanah didirikan berdasarkan akta notaris no.9 tanggal 1 Desember 1992 dan mulai beroperasi sesuai izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Keuangan RI Nomor:Kep-007/KM.17/1995 tanggal 07 Januari 1995. Setelah PT BPRS Hasanah beroperasi selama 26 tahun, PT BPRS Hasanah telah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp17.853.918.000,00.

x. PT BPRS Wakalumi

BPRS Wakalumi didirikan berdasarkan akta notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro no.8 tanggal 9 Juni 1994. BPRS Wakalumi resmi beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.16/Kep MK/17/1995 pada tanggal 16 Januari 1995. Setelah resmi beroperasi selama 26 tahun, BPRS Wakalumi memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp18388.876.000,00.

y. PT BPRS Al Ihsan

BPRS Al Ihsan mulai berdiri pada tanggal 13 Januari 1995 yang berlokasi di Jalan Jaksa Naranata no.3 Baleendah, Bandung. Setelah BPRS Al Ihsan didirikan dan mulai beroperasi, BPRS Al Ihsan telah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp32.113.172.000,00.

z. PT BPRS Hikmah Wakilah

BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan mulai beroperasi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor:KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 Juli 1995. Setelah beroperasi selama 26 tahun, BPRS Hikmah Wakilah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp119.919.815.000,00.

aa. PT BPRS Ikhsanul Amal

BPRS Ikhsanul Amal didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 11 tanggal 27 Juni 1994 oleh Notaris Mustari Sawilia, S.H di Semarang. BPRS

Ikhsanul Amal mulai beroperasi pada tahun 1995 sesuai dengan izin usaha Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor KEP-199/KM.17/95 tanggal 18 Juli 1995. Setelah 26 tahun beroperasi, BPRS Ikhsanul Amal telah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp23.843.457.000,00.

bb. PT BPRS Rahmah Hijrah Agung

BPRS Rahmah Hijrah Agung merupakan salah satu BPRS di Aceh dan juga pertama di Kota Lhokseumawe. BPRS Rahmah Hijrah Agung mulai beroperasi pada tanggal 2 Februari 1996 hingga sekarang. Setelah beroperasi selama 25 tahun, BPRS Rahmah Hijrah Agung memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp42.338.085.000,00.

cc. PT BPRS Amanahsejahtera

BPRS Amanahsejahtera merupakan BPRS pertama di Kabupaten Gresik yang telah diresmikan pada tanggal tanggal 13 Juli 1996. Sebelum peresmian tersebut, BPRS Amanahsejahtera telah beroperasi mulai tanggal 2 Januari 1996. BPRS Amanahsejahtera berlokasi di Jalan Raya Cerme Kidul 148, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Setelah 25 tahun beroperasi, BPRS Amanahsejahtera telah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp92.892.245.000,00.

dd. PT BPRS Bandar Lampung

BPRS Bandar Lampung didirikan dengan modal dasar Rp10.000.000,00 dan beroperasi setelah adanya surat izin prinsip S-1263/MK.17/1994 tanggal 29 Agustus 1994, KEP-013/KM.17/1996 tanggal 08 Januari 1996. Setelah 27 tahun beroperasi, BPRS Bandar Lampung telah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp113.990.486.000,00.

ee. PT BPRS Muamalat Harkat

BPRS Muamalat Harkat didirikan berdasarkan akta notaris Zulkifli Wildan SH. pada tanggal 5 April 1995. BPRS Muamalat Harkat mendapatkan izin operasional pada tahun 1996 sesuai izin operasional Kep.007/KM.17/1996 pada tanggal 8 Januari 1996. BPRS Muamalat Harkat berdiri dengan modal awal sebesar Rp3.000.000.000,00. Dengan modal tersebut, BPRS Muamalat Harkat mampu memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp60.662.369.000,00.

ff. PT BPRS Al Barokah

BPRS Al Barokah didirikan dengan modal dasar sebesar Rp200.000.000,00 serta memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 11 Maret 1996. Dengan modal dasar saat pendirian tersebut, BPRS Al Barokah telah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp15,224,810.000,00.

gg. PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan

BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan berdiri pada tanggal 19 Desember 1992 dengan modal dasar sebesar Rp150.000.000.000,00. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan didirikan berdasarkan akta notaris nomor 03 Tanggal 13 April 2020 Disetujui SK Menteri Hukum & HAM Nomor AHU-AH.01.03-0217139. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan telah beroperasi selama 29 tahun dan telah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp1.270.106.600.000,00.

hh. PT BPRS Gebu Prima

BPRS Gebu Prima didirikan dan beroperasi berdasarkan surat keputusan menteri Keuangan No. Kep. 030KM.171996 tanggal 23 Januari 1996. BPRS Gebu

Prima merupakan salah satu BPRS yang berlokasi di Provinsi Medan. Setelah beroperasi selama 25 tahun, BPRS Gebu Prima telah memiliki aset per Maret 2021 sebesar Rp36.926.580.000,00.

ii. PT BPRS Daya Artha Mentari

BPRS Daya Artha Mentari merupakan BPRS pertama yang didirikan di Pasuruan, Jawa Timur. BPRS Daya Artha Mentari didirikan dengan modal awal setor sebesar Rp50.000.000,00 dan secara resmi beroperasi setelah dikeluarkannya izin prinsip Menteri Kehakiman dengan no.02.18708.H.0101, kemudian tanggal 4 Maret 1996 mendapatkan izin operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan no. Kep. 095/KM.17/1996 tanggal 23 Maret 1996. Setelah BPRS Daya Artha Mentari beroperasi selama 25 tahun, BPRS Daya Artha Mentari memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp16.296.651.000,00.

jj. PT BPRS Mulia Berkah Abadi

BPRS Mulia Berkah Abadi didirikan pada tanggal 3 november 1995 berdasarkan akta Notaris Nyoya Lanny Ratna Ekowati Soebroto, S.H. BPRS Mulia Berkah Abadi merupakan pergantian nama dari PT. BPRS Risalah Ummat yang mana telah mendapatkan izin operasional sesuai SK no. Kep.107/KM.17/1996 tertanggal 27 Maret 1996. Selama 25 tahun beroperasi, BPRS Mulia Berkah Abadi telah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp150.939.646.000,00.

kk. PT BPRS Puduarta Insani

BPRS Puduarta Insani didirikan pada tanggal 10 April 1996 yang berlokasi di Jl. Pekan Raya No. 13 A Tembung, Deli Serdang. BPRS Puduarta Insani

didirikan dengan modal dasar sebesar Rp500.000.000,00. BPRS Puduarta Insani mulai beroperasi sejak 18 Juni 1996, kemudian setelah beroperasi selama 25 tahun, BPRS Puduarta Insani memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp56.751.994.000,00.

ll. PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo

BPRS Mentari Pasaman Saiyo merupakan bank syariah pertama yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1994 sesuai akta notaris Azhar Alia S.H. BPRS Mentari Pasaman Saiyo mulai beroperasi pada tanggal 27 Juli 1996 setelah penerbitan izin usaha operasional dari Menteri keuangan RI No. KEP-168/KM.17/1996 tanggal 6 Mei 1996. Setelah 25 tahun beroperasi, BPRS Mentari Pasaman Saiyo memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp13.649.559.000,00.

mm. PT BPRS Berkah Dana Fadhilah

BPRS Berkah Dana Fadhilah didirikan pada tanggal 11 Juni 1994 sesuai akta notaris H. Muhammad Afdal Ghazali, S.H dengan modal disetor sebesar Rp200.000.000,00. BPRS Berkah Dana Fadhilah mulai beroperasi secara resmi sesuai SK Menteri Keuangan RI no.Kep-197/KM.17/1996 tertanggal 6 Juni 1996. Setelah 25 tahun beroperasi, BPRS Berkah Dana Fadhilah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp47.509.312.000,00.

nn. PT BPRS Bina Rahmah

BPRS Bina Rahmah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor:02-4159.HT.01.01.TH.96 tertanggal 6 Maret 1996 dan mulai beroperasi pada tanggal 6 September 1996. BPRS Bina

Rahmah berdiri dengan modal awal sebesar Rp10.000.000.000,00. Dengan modal tersebut, BPRS Bina Rahmah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp32.122.604.000,00.

oo. PT BPRS Al Hijrah Amanah

BPRS Al Hijrah Amanah merupakan salah satu BPRS yang berlokasi di Kota Depok. BPRS Al Hijrah Amanah didirikan pada tanggal 14 Desember 1996 oleh ICMI Orsat dan para pensiunan Bank Indonesia. Setelah BPRS Al Hijrah Amanah didirikan dan beroperasi, BPRS Al Hijrah Amanah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp36.726.840.000,00.

pp. PT BPRS Gala Mitra Abadi

BPRS Gala Mitra Abadi merupakan pergantian nama dari BPRS Ben Salamah. BPRS Ben Salamah didirikan pada tanggal 18 April 2004 dengan modal dasar sebesar Rp5.000.000,00. BPRS Ben Salamah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pergantian nama menjadi BPRS Gala Mitra Abadi sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan no:S-1/KR.41/2015 tanggal 5 Januari 2015. Penetapan nama baru BPRS Gala Mitra Abadi ditetapkan sesuai izin usaha Otoritas Jasa Keuangan No : Kep-1/KR.4/2015. Setelah pendirian BPRS Ben Salamah pada tahun 2004 dan mengalami perubahan nama menjadi BPRS Gala Mitra Abadi, BPRS Gala Mitra Abadi memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp50.252.690.000,00.

qq. PT BPRS Asad Alif

BPRS Asad Alif didirikan dengan Akta Notaris Nomor 18 oleh Notaris Mustari Sawilin dan disahkan sesuai SK Menteri Kehakiman

Republik Indonesia tertanggal 5 Nopember 1997 no.C2-11481.HT.01.01.-TH. BPRS Asad Alif mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia. Setelah BPRS Asad Alif beroperasi selama 24 tahun, BPRS Asad Alif memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp39.518.419.000,00.

rr. PT BPRS Ampek Angkek Candung

BPRS Ampek Angkek Candung didirikan dan mulai beroperasi sesuai Surat Izin Usaha dengan nomor SK32/57/KE/Dir tanggal 14 Mei 1999 dengan modal dasar tercantum pada Akta Notaris H. Sofyan, S.H. no.1 tanggal 2 Februari 1998. Setelah BPRS Ampek Angkek Candung beroperasi selama 22 tahun, BPRS Ampek Angkek Candung memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp53,938,495.000,00.

ss. PT BPRS Berkah Ramadhan

BPRS Berkah Ramadhan merupakan salah satu BPRS yang berlokasi Komplek *Islamic Village* Jl. *Islamic* Raya No 1 di Tangerang. BPRS Berkah Ramadhan memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp86.327.956.000,00.

tt. PT BPRS Cilegon Mandiri

BPRS Cilegon Mandiri didirikan pada tahun 2003 dan mulai beroperasi sejak penerbitan Surat Izin Usaha No.5/2/KEP.DpG/2003 tanggal 9 April 2003. Selama beroperasi 18 tahun, BPRS Cilegon Mandiri memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp86.327.956.000,00.

uu. PT BPRS Situbondo

BPRS Situbondo merupakan satu BPRS yang berlokasi di Kabupaten Situbondo yang diresmikan pada tanggal 13 Maret 2004 yang digagas oleh

Pemerintah Kabupaten Situbondo dan beberapa tokoh masyarakat Situbondo. Selama BPRS Situbondo beroperasi, BPRS Situbondo memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp22.082.316.000,00.

vv. PT BPRS Tanggamus

BPRS Tanggamus didirikan dengan modal awal sebesar Rp25.000.000.000,00 serta modal disetor sebesar Rp7.000.000.000,00. Selama BPRS Tanggamus beroperasi, BPRS Tanggamus telah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp58.751.158.000,00.

ww. PT BPRS Buana Mitra Perwira

BPRS Buana Mitra Perwira didirikan berdasarkan gagasan dari Bupati Purbalingga, Bapak Drs. Triyono Budi Sasongko. Peresmian BPRS Buana Mitra Perwira dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2004 dan mulai beroperasi sejak 10 Juni 2004. Setelah 17 tahun beroperasi, BPRS Buana Mitra Perwira memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp188.565.725.000,00.

xx. PT BPRS Artha Surya Barokah

BPRS Artha Surya Barokah didirikan pada tahun 2002 dan mendapatkan izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 15 Juli 2003 no.C-16414.HT-01-TH-2003. BPRS Artha Surya Barokah memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 30 Juni 2004 sesuai dengan izin usaha Kep.Deputi Gubernur BI no. 6/8/KEP.DpG/2004. Selama beroperasi sejak 2004, BPRS Artha Surya Barokah memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp151.141.224.000,00.

yy. PT BPRS Suriyah

BPRS Suriyah didirikan pada tanggal 6 Januari 2005 oleh Bapak Drs. H. Mulia Budy Artha dan ibu Drs. Hj, Siti Fatimah. BPRS Suriyah berlokasi di Kabupaten Cilacap dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2005. Setelah beroperasi selama kurang lebih 16 tahun per Maret 2021, total aset yang dimiliki BPRS Suriyah sebesar Rp213.170.445.000,00.

zz. PT BPRS Bina Amanah Satria

BPRS Bina Amanah Satria didirikan pada tahun 2003 berdasarkan akta nomor 19 Tanggal 23 Desember 2003 oleh notaris Bambang W. Sudrajat, S.H yang berlokasi di Purwokerto. BPRS Bina Amanah Satria didirikan dengan modal dasar Rp2.000.000.000,00 serta modal yang disetor sebesar Rp1.500.000.000,00. Setelah beroperasi selama 18 tahun, total aset BPRS Bina Amanah Satria per Maret 2021 mencapai Rp63.614.244.000,00.

aaa. PT BPRS Artha Madani

BPRS Artha Madani merupakan salah satu BPRS yang berlokasi di Kota Bekasi dan didirikan berdasarkan akta pendirian oleh notaris Arry Supratno, S.H no. 58 tanggal 6 april 2005. Selama BPRS Artha Madani beroperasi hingga saat ini, total aset BPRS Artha Madani per Maret 2021 mencapai Rp216.032.325.000,00.

bbb. PT BPRS Khasanah Ummat

BPRS Khasanah Ummat berlokasi di di Jl. Sunan Bonang no. 27 Tambaksari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. BPRS Khasanah Ummat didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 24 Pebruari 2005.

BPRS Khasanah Ummat mulai beroperasi sejak adanya izin usaha sesuai keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/41/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Juli 2005. Setelah kurang lebih 16 tahun beroperasi, BPRS Khasanah Ummat memiliki total aset per Maret 2021 sebesar Rp13.505.255.000,00.

ccc. PT BPRS Metro Madani

BPRS Metro Madani didirikan pada tahun 2005 sesuai akta anggaran dasar oleh Notaris Hermazulia, S.H di Bandar Lampung no.1 tanggal 3 Maret 2005. BPRS Metro Madani memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 20 September 2005 dan telah mendapatkan izin usaha sesuai izin operasional dari Bank Indonesia pada tanggal 20 September 2005. Setelah beroperasi selama kurang lebih 16 tahun, total aset per Maret 2021 yang dimiliki oleh BPRS Metro Madani mencapai Rp88.280.866.000,00.

ddd. PT BPRS Lantabur Tebuireng

BPRS Lantabur Tebuireng didirikan pada tanggal 1 Maret 2006 sesuai izin usaha dari Bank Indonesia no.8/4/Kep.GBI/2006 tanggal 1 Maret 2006 dengan modal dasar Rp4.500.000.000,00 dan diresmikan pada tanggal 11 Agustus 2014. Pendirian BPRS Lantabur Tebuireng berdasarkan keputusan MENKUMHAM No. C.7026.HT.01.01 TH. 2005. Setelah beroperasi selama kurang lebih 15 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Lantabur Tebuireng per Maret 2021 mencapai Rp245.707.823.000,00.

eee. PT BPRS Haji Miskin

BPRS Haji Miskin diresmikan pada tanggal 30 Maret 2006 Bapak Harisman selaku Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta dengan

modal awal disetor sebesar Rp1.000.000.000,00. BPRS Haji Miskin mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2006. Pendirian BPRS Haji Miskin diresmikan berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.8/24IKEP.GBI/2006 tentang Pemberian Izin Usaha BPRS Haji Miskin. Setelah beroperasi selama kurang lebih 15 tahun, total aset per Maret 2021 yang dimiliki oleh BPRS Haji Miskin mencapai Rp60.838.881.000,00.

fff. PT BPRS Artha Mas Abadi

BPRS Artha Mas Abadi merupakan perubahan dari Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) Koperasi Pesantren Maslakul Huda pada tanggal 28 Juni 2006 dan telah mendapat izin operasional dari Bank Indonesia. Setelah beroperasi sejak tahun 2006, BPRS Artha Mas Abadi memiliki total aset per Maret 2021 mencapai Rp40.572.835.000,00.

ggg. PT BPRS Al Salaam Amal Salman

BPRS Al Salaam Amal Salman didirikan oleh para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tanggal 9 Oktober 1991. BPRS Al Salaam Amal Salman mulai beroperasi berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan R.I.No.Kep-049/KM.13/1992 tanggal 17 Februari 1992, sehingga BPRS Al Salaam Amal Salman memulai kegiatan pada tanggal 29 Februari 1992 berdasarkan akta No. 30 oleh Notaris Abdul Latief yang berlokasi di Jakarta. BPRS Al Salaam Amal Salman didirikan dengan modal dasar yang disetor sebesar Rp69.800.000,00. Selama beroperasi sejak 1992, BPRS Al Salaam Amal Salman memiliki total aset per Maret 2021 mencapai Rp332.615.340.000,00.

hhh. PT BPRS Dinar Ashri

BPRS Dinar Ashri didirikan berdasarkan akta pendirian oleh Notaris Fikry Said, S.H Nomor 26 tanggal 15 April 2006 dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0092435 Tahun 2021. BPRS Dinar Ashri mulai beroperasi pada tanggal 26 Juli 2006 yang berlokasi di Jalan Sriwijaya No.394 Blok X-XI Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selama 15 tahun beroperasi, BPRS Dinar Ashri memiliki total aset per Maret 2021 mencapai Rp757.170.700.000,00.

iii. PT BPRS Patriot Bekasi

BPRS Patriot Bekasi mulai beroperasi sejak diresmikan pada tanggal 18 September 2006 dengan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 berdasarkan izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 31 Agustus 2006. Modal yang dimiliki BPRS Patriot Bekasi terbagi dalam saham yang mana 51% dimiliki Pemerintah Daerah Kota. Setelah beroperasi sejak 2006, BPRS Patriot Bekasi memiliki total aset mencapai Rp276.382.867.000,00 per Maret 2021.

jjj. PT BPRS Arta Leksana

BPRS Arta Leksana berdiri dengan modal dasar sebesar Rp10.000.000.000,00 pada tahun 2006 berdasarkan akta notaris no.12 tertanggal 30 Mei 2006 oleh notaris Nuning Indraeni dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no.C-20859 HT.0101 th.2006. BPRS Arta Leksana mulai beroperasi sejak dikeluarkannya SK Gubernur Bank Indonesia no.8/67/KEP.GBI/2006.

Setelah BPRS Arta Leksana beroperasi selama 15 tahun, BPRS Arta Leksana memiliki total aset mencapai Rp44.962.501.000,00 per Maret 2021.

kkk. PT BPRS Bumi Artha Sampang

BPRS Bumi Artha Sampang didirikan pada 5 Juli 2007 yang berlokasi di Sampang, Cilacap, Jawa Tengah. Setelah 14 tahun didirikan dan beroperasi, BPRS Bumi Artha Sampang memiliki total aset mencapai Rp43.007.345.000,00 per Maret 2021.

iii. PT BPRS Karya Mugi Sentosa

BPRS Karya Mugi Sentosa didirikan pada tanggal 9 Maret 2007 yang berlokasi di Kota Surabaya. Pendirian BPRS Karya Mugi Sentosa berdasarkan akta pendirian oleh notaris Syaiful Rahman, S.H. no.9 tanggal 9 Maret 2007. BPRS Karya Mugi Sentosatelah beroperasi selama 14 tahun dan telah memiliki total aset mencapai Rp72.567.068.000,00 per Maret 2021.

mmm. PT BPRS Barokah Dana Sejahtera

BPRS Barokah Dana Sejahtera didirikan pada tahun 2007 dengan modal awal sebesar Rp12.000.000.000,00 serta modal disetor sebesar Rp8.000.000.000,00. BPRS Barokah Dana Sejahtera mulai beroperasi sejak dikeluarkannya surat izin operasional 9/51/KEP.GBI/2007 tanggal 10 Oktober 2007. Setelah BPRS Barokah Dana Sejahtera beroperasi selama kurang lebih 14 tahun, BPRS Barokah Dana Sejahtera memiliki total aset sebesar Rp141.910.872.000,00 per Maret 2021.

nnn. PT BPRS Artha Amanah Ummat

Pengajuan didirikannya BPRS Artha Amanah Ummat diajukan pada tanggal 3 Januari 2007 oleh H. Djoko Sarwono dan H. Hepta Pinardi, S.E kemudian disahkan pada tanggal 5 Juni 2007 oleh Kemenkumham Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah. Setelah beroperasi selama 14 tahun, BPRS Artha Amanah Ummat memiliki total aset mencapai Rp37.319.833.000,00 per Maret 2021.

ooo. PT BPRS Mitra Amal Mulia

BPRS Mitra Amal Mulia didirikan dengan modal dasar sebesar Rp2.000.000.000,00 sesuai akta pendirian no.80 tanggal 22 Juni 2007 oleh notaris Wahyu Wiryono S.H, kemudian disahkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 23 Juli 2010. BPRS Mitra Amal Mulia mulai beroperasi sesuai izin usaha no.9/55/KEP.GBI/2007. Setelah BPRS Mitra Amal Mulia beroperasi selama 14 tahun, BPRS Mitra Amal Mulia memiliki total aset mencapai Rp57.413.035.000,00 per Maret 2021.

ppp. PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

BPRS Madina Mandiri Sejahtera didirikan pada tanggal 3 Desember 2007 dengan modal dasar sebesar Rp750.000.000,00 sesuai akta no: 24 tanggal 7 Februari 2007 oleh notaris Wahyu Wiryono,S.H. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mulai beroperasi sesuai izin usaha no. 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007. Setelah BPRS Madina Mandiri Sejahtera beroperasi sejak 2007, BPRS Madina Mandiri Sejahtera memiliki total aset sebesar Rp77.241.006.000,00.

qqq. PT BPRS Gayo

BPRS Gayo merupakan hasil pergantian nama dari PT BPRS Renggali yang telah didirikan pada tanggal 4 Februari 2008 dan berlokasi di Kabupaten Aceh Tengah. Proses pergantian nama tersebut disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU 0023765.AH.01.02 Tahun 2017. Setelah proses pendirian BPRS Renggali hingga pergantian nama menjadi BPRS Gayo, BPRS Gayo memiliki total aset sebesar Rp37.607.620.000,00 per Maret 2021.

rrr. PT BPRS Syarikat Madani

BPRS Syarikat Madani didirikan akta no.26 tanggal 26 tahun 2007 oleh notaris Justitia Feryanto, S.H dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum Hak Azasi Manusia Republik Indonesia no.W33-000704 HT.01.01-TH2007 tanggal 24 Agustus 2007. Setelah BPRS Syarikat Madani beroperasi, total aset BPRS Syarikat Madani mencapai Rp95.602.606.000,00 per Maret 2021.

sss. PT BPRS Dana Mulia

BPRS Dana Mulia mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2008 setelah diresmikan pada tanggal 26 Maret 2008. BPRS Dana Mulia mendapatkan izin prinsip berdasarkan surat dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 9/826/BPBS tanggal 31 Mei 2007. Sejak BPRS Dana Mulia beroperasi pada tahun 2008, BPRS Dana Mulia memiliki total aset sebesar Rp58.278.774.000,00 per Maret 2021.

ttt. PT BPRS Sukowati Sragen

BPRS Sukowati Sragen didirikan berdasarkan akta pendirian oleh notaris Sunastitiningasih Sapai Widaryo, S.H akta nomor 15 tanggal 09 Juni 2009 dan

disahkan berdasarkan SK Kemenkumham no.AHU-41113.A.H.01.01. Tahun 2009 tertanggal 24 Agustus 2009. BPRS Sukowati Sragen berdiri dengan modal awal sebesar Rp30.000.000.000,00. Setelah BPRS Sukowati Sragen beroperasi, total aset yang dimiliki oleh BPRS Sukowati Sragen mencapai Rp236.984.062.000,00 per Maret 2021.

uuu. PT BPRS Dana Amanah Surakarta

BPRS Dana Amanah Surakarta merupakan BPRS kedua yang berdiri di Kota Surakarta yang diresmikan pada tanggal 23 Mei 2008. BPRS Dana Amanah Surakarta mulai beroperasi pada tanggal 2 Juni 2008. Selama BPRS Dana Amanah Surakarta beroperasi, BPRS Dana Amanah Surakarta telah memiliki total aset sebesar Rp61.099.778.000,00 per Maret 2021.

vvv.PT BPRS Mandiri Mitra Sukses

BPRS Mandiri Mitra Sukses diresmikan pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan akta pendirian No 1 tanggal 3 Maret 2008 oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H. BPRS Mandiri Mitra Sukses mulai beroperasi sesuai izin usaha dari BI no: 10/42/kep.gbi/2008 tanggal 19 Juni 2008. Setelah BPRS Mandiri Mitra Sukses beroperasi selama 13 tahun, BPRS Mandiri Mitra Sukses memiliki total aset sebesar Rp64.232.844.000,00 per Maret 2021.

www. PT BPRS Sarana Prima Mandiri

BPRS Sarana Prima Mandiri memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 Juli 2008 sesuai SK Gubernur Bank Indonesia no.10/41/KEP.GBI/2008.. Kantor Pusat BPRS Sarana Prima Mandiri berlokasi di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan merupakan Kantor Cabang

BPRS Sarana Prima Mandiri. Setelah BPRS Sarana Prima Mandiri beroperasi selama 13 tahu, BPRS Sarana Prima Mandiri memiliki total aset sebesar Rp91.781.575.000,00 per Maret 2021.

xxx.PT BPRS Danagung Syariah

BPRS Danagung Syariah didirikan berdasarkan akta no.09 oleh notaris Tri Agus Heryono, S.H pada tanggal 15 Juli 2008. BPRS Danagung Syariah didirikan dengan modal awal sebesar Rp750.000.000,00 dan disahkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor C-00178 HT01.01-TH.2007 dan Nomor AHU02527.AH.01.02. Total aset yang dimiliki oleh BPRS Danagung Syariah selama beroperasi 13 tahun mencapai Rp37.372.048.000,00.

yyy.PT BPRS Rajasa

BPRS Rajasa didirikan pada tanggal 31 Juli 2008 dan disahkan berdasarkan akta notaris nomor 41 oleh notaris Tubagus Lukman Suheru, S.H tanggal 29 Maret 2010. BPRS Rajasa mulai beroperasi sesuai izin prinsip 12/8/KEP.PBI/2010, tanggal 18 Agustus 2010. Setelah BPRS Rajasa beroperasi selama 11 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Rajasa per Maret 2021 mencapai Rp49.584.576.000,00.

zzz. PT BPRS Kotabumi

BPRS Kotabumi diresmikan oleh Gubernur Lampung pada tahun 2008 dan memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 29 Juli 2008. BPRS Kotabumi berdiri berdasarkan modal awal sebesar Rp15.000.000.000,00. Setelah BPRS Kotabumi beroperasi selama 13 tahun, BPRS Kotabumi memiliki total aset sebesar Rp184.855.390.000,00 per Maret 2021.

aaaa. PT BPRS Al Makmur

BPRS Al Makmur berdiri sejak tanggal 18 Juli 1993 sesuai akta pendirian oleh Notaris no.68 Chufnan Hamad, S.H. Proses pendirian BPRS Al Makmur disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui SK nomor. C2-11744HT 01-01 Th. 1993 tanggal 3 November 1993. Setelah BPRS Al Makmur beroperasi, total aset yang dimiliki BPRS Al Makmur mencapai Rp59.967.357.000,00 per Maret 2021.

bbbb. PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia

BPRS Mitra Cahaya Indonesia didirikan sesuai akta badan hukum no.17 tanggal 11 Januari 2008 oleh Wahyu Wiryono sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT di Yogyakarta. BPRS Mitra Cahaya Indonesia secara resmi memulai kegiatan operasional setelah acara *Grand Opening* pada tanggal 1 September 2008 sesuai izin operasional nomor 10/51/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 7 Juli 2008. Setelah BPRS Mitra Cahaya Indonesia beroperasi selama 13 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Mitra Cahaya Indonesia mencapai Rp163.359.287.000,00 per Maret 2021.

cccc. PT BPRS FORMES

BPRS FORMES berlokasi di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta. BPRS FORMES secara resmi beroperasi pada tanggal 22 Desember 2008. BPRS FORMES memulai kegiatan setelah diadakannya *Soft Opening* pada tanggal 19 Januari 2009. Sejak BPRS FORMES memulai kegiatan operasionalnya, total aset yang dimiliki oleh BPRS FORMES mencapai Rp41.764.713.000,00 per Maret 2021.

dddd. PT BPRS Central Syariah Utama

BPRS Central Syariah Utama berlokasi di Jl.Hasanudin No.109 B Srambatan Surakarta. Pada tahun 2021, BPRS Central Syariah Utama secara resmi menempati kantor barunya di Jalan Radjiman 439 Laweyan Solo yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Kepala OJK Surakarta Eko Yuniarto dan Komisaris Utama BPRS CSU Achmad Purnomo. Setelah BPRS Central Syariah Utama beroperasi, total aset yang dimiliki BPRS Central Syariah Utama mencapai Rp38.283.835.000,00 per Maret 2021.

eeee. PT BPRS Cempaka Al Amin

BPRS Cempaka Al Amin berlokasi di Wilayah Kota Jakarta Selatan dan telah diakuisisi oleh PT ALAMI Fintek Sharia yang merupakan platform *Peer To Peer Lending*. Setelah proses akuisisi, BPRS Cempaka Al Amin berganti nama menjadi PT BPRS Hijra Alami. Total aset yang dimiliki oleh BPRS Hijra Alami mencapai Rp20.722.554.000,00 per Maret 2021.

ffff. PT BPRS Madinah

BPRS Madinah berlokasi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Proses pendirian BPRS Madinah berdasarkan akta pendirian no: 48 Tahun 2008 oleh Notaris Haryo Bimo Bramantyo, S.H, M.Kn, tanggal 13 Oktober 2008 berdasarkan modal yang disetor sebesar Rp1.000.000.000,00. BPRS Madinah memulai kegiatan operasionalnya secara resmi pada tanggal 9 Juni 2009 sesuai izin usaha no:11/26/KEP.GBI/DpG/2009 tertanggal 18 Mei 2009 dari Gubernur

Bank Indonesia. Setelah BPRS Madinah beroperasi selama 12 tahun, total aset BPRS Madinah mencapai Rp25.980.645.000,00 per Maret 2021.

gggg. PT BPRS Lampung Timur

BPRS Lampung Timur secara resmi mulai beroperasi dengan modal dasar sebesar Rp8.000.000.000,00 tanggal 30 Juli 2009 dan diresmikan oleh Bupati Lampung Timur Bpk. Satono, S.H. Setelah BPRS Lampung Timur beroperasi selama 12 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Lampung Timur mencapai Rp52.443.117.000,00 per Maret 2021.

hhhh. PT BPRS Al Mabur Klaten

BPRS Al Mabur Klaten merupakan salah satu BPRS yang berlokasi di Kabupaten Klaten. Selama BPRS Al Mabur Klaten beroperasi, total aset yang dimiliki oleh BPRS Al Mabur Klaten mencapai Rp82.736.208.000,00 per Maret 2021.

iiii. PT BPRS Artha Pamenang

BPRS Artha Pamenang didirikan sesuai akta notaris no.112 tertanggal 25 Mei 1989 oleh notaris Suroso S.H di Kediri. BPRS Artha Pamenang memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 20 November 1989 sesuai izin usaha Menteri Keuangan R.I Nomor KEP.167/KM.13/1989 tanggal 9 Oktober 1989. Perkembangan BPRS Artha Pamenang dapat dikatakan sangat lambat, hal tersebut dapat terlihat pada total aset yang dimiliki hanya sebesar Rp52.091.876.000,00 per Maret 2021 setelah BPRS Artha Pamenang beroperasi selama 32 tahun.

jjjj. PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera

BPRS Rahmania Dana Sejahtera didirikan pada tahun 2010 dan memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 28 April 2010. BPRS Artha Pamenang memulai kegiatan pemasaran sejak Juli 2010. Setelah BPRS Artha Pamenang beroperasi selama 11 tahun, BPRS Artha Pamenang memiliki total aset sebesar Rp33.341.337.000,00 per Maret 2021.

kkkk. PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta

BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta merupakan bagian dari Mitra Harmoni Group. Adapun BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta berlokasi di Jl. Dr. Sutomo No. 07 Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta. Selama BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta beroperasi, total yang dimiliki oleh BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta mencapai Rp83.180.878.000,00 per Maret 2021.

llll. PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang

BPRS Mitra Harmoni Kota Malang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan no. 56 tahun 2009 oleh Notaris Arswendy Kamuli,S.H di Jakarta dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia No.AHUAH.01.10.21731 tanggal 23 Agustus 2010. Setelah BPRS Mitra Harmoni Kota Malang beroperasi selama 11 tahun, BPRS Mitra Harmoni Kota Malang memiliki total aset sebesar Rp30.793.537.000,00 per Maret 2021.

mmmm.PT BPRS Al Madinah Tasikmalaya

BPRS Al Madinah Tasikmalaya memulai kegiatan operasionalnya secara resmi sejak tanggal 28 Desember 2010 yang diresmikan oleh Walikota Semarang. BPRS Al Madinah Tasikmalaya memulai kegiatan operasional sesuai izin usaha

no.12/2585/DPbS/DpG/2010 tertanggal 20 Desember 2010 dari Bank Indonesia. Setelah 11 tahun beroperasi, BPRS Al Madinah Tasikmalaya memiliki total aset sebesar Rp36.880.130.000,00 per Maret 2021.

nnnn. PT BPRS Way Kanan

BPRS Way Kanan didirikan sesuai Perda Kabupaten Way Kanan no.2 tahun 2009 dan SK Kemenkumham RI no:AHU-50532.A.H.01.01 tanggal 27 Oktober 2010. BPRS Way Kanan memulai kegiatan operasionalnya sejak tanggal 24 Januari 2011 berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 13/1/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 11 Januari 2011. Setelah BPR Syariah Way Kanan beroperasi selama 10 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPR Syariah Way Kanan mencapai Rp77.450.696.000,00 per Maret 2021.

oooo. PT BPRS Dharma Kuwera

BPRS Dharma Kuwera didirikan pada tanggal 6 April 2011 berdasarkan dikeluarkannya surat izin usaha sesuai SK Gubernur Bank Indonesia No.13/23/KEP.GBI/DpG/2011 tanggal 6 April 2011. BPRS Dharma Kuwera memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 29 April 2011. Setelah beroperasi selama 10 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Dharma Kuwera mencapai Rp49.810.757.000,00 per Maret 2021.

pppp. PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung didirikan pada bulan September 2011. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung merupakan anggota bagian dari Mitra Harmoni *Group*. Setelah beroperasi selama 10 tahun, BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung memiliki total aset sebesar Rp27.273.857.000,00 per Maret 2021.

qqqq. PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang

BPRS Gajahtongga Kotopiliang didirikan berdasarkan modal dasar sebesar Rp3.000.000.000,00 serta modal disetor sebesar Rp1.380.000.000,00 sesuai akta notaris no.55 tertanggal 12 Juli 1990 oleh notaris Nasrul Jambi, S.H. BPRS Gajahtongga Kotopiliang mulai beroperasi pada tahun 1990 sesuai dengan SK No. 518/KM.13/1990. Setelah beroperasi selama 31 tahun, BPRS Gajahtongga Kotopiliang memiliki total aset sebesar Rp33.172.539.000,00 per Maret 2021.

rrrr. PT BPRS Cahaya Hidup

BPRS Cahaya Hidup merupakan salah satu BPRS yang berlokasi di Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. Selama beroperasi, BPRS Cahaya Hidup memiliki total aset sebesar Rp33.206.816.000,00 per Maret 2021.

ssss. PT BPRS Bahari Berkesan

BPRS Bahari Berkesan merupakan bank syariah pertama yang berlokasi di Kota Ternate, Maluku Utara. BPRS Bahari Berkesan didirikan berdasarkan modal dasar sebesar Rp8.000.000.000,00 berdasarkan Perda Kota Ternate No.27 tanggal 15 juni 2011 dan akta pendirian no.48 tanggal 27 Desember 2011 oleh notaris Tatiek Nurdjanti, S.H. BPRS Bahari Berkesan mulai beroperasi sejak 19 April 2012. Setelah BPRS Bahari Berkesan beroperasi selama 9 tahun, total aset BPRS Bahari Berkesan mencapai Rp92.124.335.000,00 per Maret 2021.

tttt. PT BPRS Magetan

BPRS Magetan didirikan pada tanggal 14 Juni 2012 sesuai perda Kabupaten Magetan No.9 tahun 2008 dan akta pendirian no.53 Yvonne Erawati, S.H. BPRS Magetan berdiri dengan modal dasar sebesar Rp15.000.000.000,00.

Setelah BPRS Magetan beroperasi, total aset yang dimiliki BPRS Magetan mencapai Rp45.155.073.000,00 per Maret 2021.

uuuu. PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang

BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang didirikan sesuai akta pendirian no.19 tertanggal 4 Februari 2010 oleh notaris Choiriyah, S.H. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 69, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang – Kabupaten Sampang. BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang mulai beroperasi sesuai SK Gubernur Bank Indonesia no: 12/40/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 18 Mei 2010. Setelah BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang beroperasi selama 11 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang mencapai Rp77.518.868.000,00 per Maret 2021.

vvvv. PT BPRS Saka Dana Mulia

BPRS Saka Dana Mulia merupakan satu-satunya BPRS yang berlokasi di Kabupaten Kudus yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.10 Tanggal 04 Januari 2012. Peresmian BPRS Saka Dana Mulia dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013 oleh Bank Indonesia. BPRS Saka Dana Mulia memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 Februari 2013 sesuai izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 Desember 2012. Setelah BPRS Saka Dana Mulia beroperasi selama 8 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Saka Dana Mulia mencapai Rp32.307.029.000,00 per Maret 2021.

www. PT BPRS Mitra Agro Usaha

BPRS Mitra Agro Usaha didirikan pada tanggal 23 Juli 2013 sesuai SK Gubernur BI no. 15/81/KEP.GBI/DPG 2013. BPRS Mitra Agro Usaha berlokasi di Jalan Hayam Wuruk no.95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. BPRS Mitra Agro Usaha mulai beroperasi pada tanggal 2 September 2013. Setelah beroperasi selama 8 tahun, total aset yang dimiliki BPRS Mitra Agro Usaha mencapai Rp34.050.752.000,00 per Maret 2021.

xxxx. PT BPRS Harta Insan Karimah Surakarta

BPRS Harta Insan Karimah Surakarta merubakan cabang dari PT Induk Harta Insan Karimah. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta secara resmi memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 25 Januari 2014. Setelah BPRS Harta Insan Karimah Surakarta beroperasi selama 7 tahun, total aset yang dimiliki BPRS Harta Insan Karimah Surakarta mencapai Rp200.444.862.000,00 per Maret 2021.

yyyy. PT BPRS Aman Syariah

BPRS Aman Syariah didirikan pada tanggal 17 Maret 2012 sesuai Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, S.H. BPRS Aman Syariah mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 sesuai dikeluarkannya Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014. Setelah beroperasi selama 7 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Aman Syariah mencapai Rp23.099.455.000,00 per Maret 2021.

zzzz. PT BPRS Lampung Barat

BPRS Lampung Barat didirikan pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan modal dasar sebesar Rp6.000.000.000,00 sesuai akta pendirian No. 05 Tahun 2014 oleh notaris Rosmaladewi, S.H. BPRS Lampung Barat memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 15 September 2015. Setelah beroperasi selama 6 tahun, BPRS Lampung Barat memiliki total aset sebesar Rp50.114.150.000,00 per Maret 2021.

aaaaa. PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat

BPRS Tani Tulang Bawang Barat memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 19 Januari 2016 sesuai SK OJK no.Kep-1/D.03/2016 tanggal 4 Januari 2016. BPRS Tani Tulang Bawang Barat berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Setelah beroperasi selama 5 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Tani Tulang Bawang Barat mencapai Rp30.035.277.000,00 per Maret 2021.

bbbbbb. PT BPRS Unisia Insan Indonesia

BPRS Unisia Insan Indonesia merupakan salah satu BPRS yang berlokasi di Sleman, D.I Yogyakarta. BPRS Unisia Insan merupakan bagian dari Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang berlokasi di Jl. Cik Ditiro Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Selama BPRS Unisia Insan Indonesia memulai kegiatan operasionalnya, total aset yang dimiliki oleh BPRS Unisia Insan Indonesia mencapai Rp77.702.410.000,00 per Maret 2021.

cccc. PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera

BPRS Mitra Mentari Sejahtera secara resmi memulai kegiatan operasional pada tanggal 11 Desember 2016 berdasarkan modal awal disetor sebesar Rp6.000.000.000,00. Prosesi peresmian dan pengesahan BPRS Mitra Mentari Sejahtera dilakukan di Graha Watoe Dhakon IAIN Ponorogo. Setelah BPRS Mitra Mentari Sejahtera beroperasi 5 tahun, total aset yang dimiliki oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera mencapai Rp27.669.779.000,00 per Maret 2021.

2. Deskripsi Variabel

Data variabel pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan melalui situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Desember 2017-2020. Adapun data variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, BOPO, dan NPF. Sedangkan data variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Untuk data ROA dapat dilihat dari neraca atau laporan keuangan publikasi atau rasio keuangan, data BOPO dapat dilihat dari laporan laba rugi atau melalui rasio keuangan, data NPF dapat dilihat dari laporan keuangan publikasi atau rasio keuangan, dan data tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dapat diketahui dari laporan distribusi bagi hasil. Data yang tidak tercantum pada situs OJK, maka dilakukan perhitungan secara manual berdasarkan rumus yang telah diuraikan pada BAB III.

Sehingga dari perhitungan menggunakan rumus yang telah dijabarkan pada BAB III, dapat diperoleh data penelitian ROA, BOPO, NPF dn tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dijabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 4.1
Data Variabel

NO	Nama BPRS	PERIODE	ROA (%)	BOPO ¹¹¹ (%)	NPF (%)	TBH (%)
1	PT BPRS Amanah Rabbaniah	2017	3.00	47.34	4.88	11.00
		2018	2.91	47.39	4.54	9.00
		2019	3.67	48.97	0.20	3.35
		2020	5.64	71.97	3.21	8.82
2	PT BPRS Amanah Ummah	2017	3.40	53.21	3.31	9.00
		2018	3.65	54.81	3.31	8.00
		2019	3.31	71.71	1.28	8.74
		2020	2.99	73.39	2.38	8.45
3	PT BPRS Artha Karimah Irsyadi	2017	2.35	50.04	8.34	11.00
		2018	1.39	58.80	2.87	11.00
		2019	0.00	90.00	2.16	10.00
		2020	0.45	95.80	1.41	9.95
4	PT BPRS Mentari	2017	4.34	41.20	8.69	8.00
		2018	3.75	44.03	9.86	7.00
		2019	3.62	82.17	6.39	7.63
		2020	3.70	70.58	5.86	7.31
5	PT BPRS Baiturridha Pusaka	2017	8.44	48.52	2.42	9.00
		2018	5.02	61.69	2.28	6.00
		2019	7.46	71.01	1.74	55.00
		2020	7.78	62.89	1.74	6.11
6	PT BPRS Harta Insan Karimah	2017	1.62	43.56	2.24	10.00
		2018	0.69	47.80	1.98	11.00
		2019	1.34	83.17	1.31	11.93
		2020	0.16	96.16	1.20	9.50
7	PT BPRS Barkah Gemadana	2017	1.21	64.01	2.52	5.00
		2018	0.60	75.67	1.34	7.00
		2019	3.41	66.91	6.25	7.11
		2020	1.98	74.09	2.84	6.78
8	PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi	2017	1.70	48.71	2.47	11.00
		2018	1.99	48.39	2.22	11.00
		2019	0.21	97.00	1.15	10.00
		2020	0.16	99.15	1.79	9.80
9	PT BPRS	2017	2.88	49.31	8.59	8.00

¹¹¹ Data akun terlibat dalam perhitungan BOPO terlampir

	Margirizki Bahagia	2018	1.70	55.48	8.76	7.00
		2019	3.05	61.74	1.31	6.97
		2020	2.27	77.14	1.06	5.96
10	PT BPRS Bangun Drajat Warga	2017	2.41	51.53	9.80	6.00
		2018	2.35	52.57	9.28	6.00
		2019	2.42	65.68	7.49	8.18
		2020	1.77	75.45	6.24	8.50
11	PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung	2017	7.76	35.42	2.00	12.00
		2018	7.94	36.78	1.53	12.00
		2019	6.81	55.75	0.86	11.29
		2020	4.42	65.95	0.94	9.68
12	PT. BPRS PNM Patuh Beramal	2017	3.59	42.13	5.78	11.00
		2018	5.68	36.48	7.43	11.00
		2019	6.66	55.09	3.77	11.01
		2020	5.81	57.59	3.79	9.89
13	PT BPRS Baktimakmur Indah	2017	3.65	52.11	8.80	7.00
		2018	2.77	53.93	9.90	10.00
		2019	3.08	79.48	4.62	7.65
		2020	1.67	85.89	4.78	7.46
14	PT BPRS Baiturrahman	2017	1.08	64.27	9.01	0.11
		2018	1.13	62.58	9.97	0.09
		2019	0.37	97.32	1.10	3.75
		2020	1.13	98.03	1.45	0.60
15	PT BPRS AlMasoem	2017	1.48	50.16	1.58	10.00
		2018	1.87	50.67	1.63	10.00
		2019	2.36	86.05	3.78	10.07
		2020	2.43	83.94	1.20	9.52
16	PT BPRS Dana Moneter	2017	1.03	52.19	7.87	9.00
		2018	0.22	53.13	1.96	7.00
		2019	1.98	97.11	7.49	9.23
		2020	1.05	87.00	4.67	6.09
17	PT BPRS Amanah Bangsa	2017	4.15	53.02	0.52	12.00
		2018	2.12	54.90	2.35	10.00
		2019	2.08	88.58	3.35	10.07
		2020	2.26	88.22	1.00	10.00
18	PT BPRS Asri Madani Nusantara	2017	2.07	47.41	4.67	7.00
		2018	0.13	59.54	3.87	5.00
		2019	0.49	99.46	7.54	3.68
		2020	2.94	30.92	4.86	10.05
19	PT BPRS Muamalah Cilegon	2017	2.10	68.15	2.39	8.00
		2018	2.46	66.97	1.51	8.00
		2019	9.99	81.88	6.09	8.71
		2020	3.22	81.72	2.83	8.93
20	PT BPRS Al Washliyah	2017	4.43	93.40	1.63	10.00
		2018	3.88	79.10	1.21	10.00

		2019	4.02	86.62	8.29	9.00
		2020	8.51	97.05	2.69	8.00
21	PT BPRS Attaqwa	2017	3.75	50.00	8.06	14.00
		2018	3.86	44.30	6.81	8.00
		2019	0.78	93.48	9.80	11.00
		2020	1.61	65.78	8.77	6.96
		2017	5.92	46.62	4.99	10.00
22	PT BPRS Al Falah	2018	5.74	46.64	4.95	11.00
		2019	5.42	74.67	3.88	8.80
		2020	4.49	74.26	3.88	6.06
		2017	0.38	64.12	8.25	6.00
23	PT BPRS Hasanah	2018	0.69	66.48	1.40	6.00
		2019	1.87	82.71	1.43	5.80
		2020	0.41	92.50	9.10	4.53
		2017	0.85	67.37	6.82	9.00
24	PT BPRS Wakalumi	2018	1.89	67.39	1.15	11.00
		2019	0.29	30.75	1.70	11.94
		2020	4.04	49.93	8.51	7.22
		2017	3.16	58.89	5.51	10.00
25	PT BPRS Al Ihsan	2018	3.25	58.87	1.14	9.00
		2019	2.69	61.45	9.54	9.91
		2020	0.65	85.65	2.46	8.74
		2017	2.51	43.21	2.94	9.00
26	PT BPRS Hikmah Wakilah	2018	2.43	43.23	2.13	9.00
		2019	2.63	6.72	2.64	9.13
		2020	1.67	76.91	3.51	8.37
		2017	0.33	80.17	7.64	7.00
27	PT BPRS Ikhsanul Amal	2018	0.86	65.65	7.74	10.00
		2019	2.09	81.97	6.22	14.57
		2020	0.70	92.58	5.05	8.35
		2017	1.08	61.32	1.18	9.00
28	PT BPRS Rahmah Hijrah Agung	2018	0.58	57.86	7.70	8.00
		2019	0.50	98.80	6.96	7.45
		2020	1.16	92.15	4.99	5.09
		2017	0.04	89.28	2.27	4.00
29	PT BPRS Amanahsejah tera	2018	6.12	85.29	0.94	4.00
		2019	4.61	95.68	1.06	3.63
		2020	1.61	97.79	8.11	3.86
		2017	2.64	38.26	3.39	10.00
30	PT BPRS Bandar Lampung	2018	2.90	40.16	3.27	12.00
		2019	3.42	77.49	2.96	10.69
		2020	3.15	78.15	2.81	10.62
		2017	0.66	78.83	2.90	14.00
31	PT BPRS Muamalat Harkat	2018	2.76	55.94	1.38	11.00
		2019	4.23	71.63	1.06	10.11

		2020	3.73	70.13	9.66	10.66
32	PT BPRS Al Barokah	2017	3.89	45.54	1.55	11.00
		2018	6.00	50.90	2.89	8.00
		2019	2.10	74.91	1.55	10.40
		2020	1.03	87.20	2.55	10.40
33	PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	2017	4.60	36.48	2.76	12.00
		2018	4.55	37.49	2.62	12.00
		2019	4.68	77.75	1.35	10.00
		2020	2.94	82.90	1.85	9.01
34	PT BPRS Gebu Prima	2017	0.76	67.88	1.62	6.00
		2018	0.13	59.35	3.30	1.00
		2019	0.04	103.43	3.16	8.21
		2020	1.21	95.33	4.49	10.41
35	PT BPRS Daya Artha Mentari	2017	2.12	13.90	3.56	5.00
		2018	2.72	67.95	1.46	4.00
		2019	2.00	88.00	1.46	3.76
		2020	0.60	95.35	1.53	2.05
36	PT BPRS Mulia Berkah Abadi	2017	3.15	35.60	2.86	10.00
		2018	6.39	32.43	1.60	10.00
		2019	2.45	36.73	1.92	9.14
		2020	0.44	91.76	3.20	6.93
37	PT BPRS Puduarta Insani	2017	1.82	43.59	1.48	9.00
		2018	1.27	53.79	2.14	9.00
		2019	1.82	77.89	1.58	8.95
		2020	0.03	98.36	0.84	9.88
38	PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo	2017	1.36	64.55	1.46	6.00
		2018	1.66	76.06	2.18	7.00
		2019	0.08	93.01	1.06	10.31
		2020	0.07	96.08	8.51	5.99
39	PT BPRS Berkah Dana Fadhillah	2017	1.45	92.28	7.77	6.00
		2018	3.08	74.17	6.18	7.00
		2019	2.65	7.68	1.40	6.35
		2020	2.58	70.92	4.10	5.92
40	PT BPRS Bina Rahmah	2017	6.30	11.29	3.56	8.00
		2018	1.49	18.30	5.07	9.00
		2019	3.31	71.71	1.28	8.74
		2020	1.32	95.39	3.62	9.26
41	PT BPRS Al Hijrah Amanah	2017	2.21	53.13	1.12	9.00
		2018	1.52	51.47	1.34	12.00
		2019	0.27	98.70	8.59	8.56
		2020	0.35	95.49	6.56	7.56
42	PT BPRS Gala Mitra Abadi	2017	1.91	62.52	5.16	11.00
		2018	0.39	58.99	6.51	11.00
		2019	1.75	81.90	3.52	10.08
		2020	6.77	64.00	2.76	10.00

43	PT BPRS Asad Alif	2017	1.46	66.87	8.17	11.00
		2018	0.55	72.50	6.66	9.00
		2019	2.36	80.01	2.06	10.30
		2020	1.62	83.47	1.95	9.59
44	PT BPRS Ampek Angkek Candung	2017	1.76	67.45	1.94	6.00
		2018	1.45	72.31	1.68	4.00
		2019	1.61	81.88	1.47	4.27
		2020	1.48	86.95	1.32	4.30
45	PT BPRS Berkah Ramadhan	2017	3.63	80.26	3.32	10.00
		2018	1.16	74.82	4.93	6.00
		2019	0.06	100.63	1.84	4.61
		2020	1.86	87.73	2.16	3.44
46	PT BPRS Cilegon Mandiri	2017	5.79	75.26	3.01	7.00
		2018	1.35	79.52	2.04	7.00
		2019	0.60	96.06	7.72	6.25
		2020	0.39	101.45	1.05	7.57
47	PT BPRS Situbondo	2017	4.91	74.55	7.99	5.00
		2018	0.75	78.09	1.71	6.00
		2019	0.28	97.22	1.22	14.60
		2020	2.18	85.38	3.88	7.00
48	PT BPRS Tanggamus	2017	6.38	50.93	2.62	12.00
		2018	7.70	45.89	2.47	10.00
		2019	5.58	61.58	0.42	10.66
		2020	7.41	52.56	0.35	8.20
49	PT BPRS Buana Mitra Perwira	2017	2.90	53.82	5.39	9.00
		2018	3.00	50.33	6.49	9.00
		2019	2.76	73.56	5.25	8.41
		2020	2.66	71.69	5.75	7.85
50	PT BPRS Artha Surya Barokah	2017	2.61	54.62	4.09	9.00
		2018	2.65	50.28	4.82	9.00
		2019	3.00	76.62	5.44	9.66
		2020	2.11	75.09	2.00	8.70
51	PT BPRS Suriyah	2017	2.67	45.59	3.95	10.00
		2018	2.40	44.48	5.60	9.00
		2019	2.60	78.00	6.40	9.08
		2020	1.36	82.09	3.90	8.79
52	PT BPRS Bina Amanah Satria	2017	2.02	62.99	7.00	9.00
		2018	2.16	55.75	9.50	9.00
		2019	3.37	82.61	4.36	8.88
		2020	2.33	84.02	4.57	8.80
53	PT BPRS Artha Madani	2017	2.38	42.64	9.69	6.00
		2018	1.07	40.34	1.32	6.00
		2019	0.91	94.79	3.74	6.41
		2020	0.84	93.50	1.94	6.08
54	PT BPRS	2017	6.56	62.63	1.45	9.00

	Khasanah Ummat	2018	5.72	70.13	8.32	8.00
		2019	0.01	98.45	8.92	7.13
		2020	3.71	85.71	9.12	4.48
55	PT BPRS Metro Madani	2017	3.53	50.18	4.34	9.00
		2018	3.47	54.40	6.31	11.00
		2019	3.75	69.11	6.41	38.00
		2020	2.00	88.47	5.22	7.98
56	PT BPRS Lantabur Tebuireng	2017	4.36	40.10	5.08	5.00
		2018	3.66	39.48	5.41	5.00
		2019	4.06	65.00	3.37	4.81
		2020	3.11	71.00	7.66	6.06
57	PT BPRS Haji Miskin	2017	2.66	51.70	4.80	7.00
		2018	2.77	49.22	4.54	6.00
		2019	2.40	73.53	2.79	6.83
		2020	2.14	74.19	2.83	8.59
58	PT BPRS Artha Mas Abadi	2017	2.44	63.22	9.84	10.00
		2018	3.33	62.38	8.35	10.00
		2019	3.18	79.97	6.70	9.29
		2020	3.29	78.92	4.44	11.00
59	PT BPRS Al Salaam Amal Salman	2017	2.42	57.76	4.71	9.00
		2018	2.29	57.50	2.87	8.00
		2019	2.31	82.50	3.53	8.49
		2020	1.01	61.67	2.02	6.71
60	PT BPRS Dinar Ashri	2017	4.06	28.50	2.72	9.00
		2018	5.10	23.51	1.67	10.00
		2019	7.21	61.75	0.59	9.26
		2020	5.77	66.11	0.67	9.39
61	PT BPRS Patriot Bekasi	2017	2.61	47.68	1.96	5.00
		2018	2.37	48.51	1.78	11.00
		2019	4.38	77.99	0.23	10.66
		2020	2.38	82.80	1.32	10.48
62	PT BPRS Arta Leksana	2017	2.80	56.72	9.24	7.00
		2018	3.07	55.63	1.06	7.00
		2019	1.96	82.74	4.52	0.10
		2020	2.89	77.02	4.67	8.00
63	PT BPRS Bumi Artha Sampang	2017	3.09	55.07	8.34	10.00
		2018	2.98	55.64	6.64	8.00
		2019	2.28	85.35	1.09	10.00
		2020	1.97	84.08	8.18	8.00
64	PT BPRS Karya Mugi Sentosa	2017	5.11	64.97	1.40	9.00
		2018	2.52	66.10	5.98	7.00
		2019	2.38	84.10	5.24	5.78
		2020	1.93	89.72	6.10	4.59
65	PT BPRS Barokah	2017	1.97	46.07	4.91	10.00
		2018	2.73	42.68	3.41	10.00

	Dana Sejahtera	2019	0.03	90.72	0.04	9.54
		2020	0.87	84.33	3.29	7.67
66	PT BPRS Artha Amanah Ummat	2017	2.08	44.55	6.18	9.00
		2018	2.10	45.20	5.23	9.00
		2019	1.79	81.26	3.77	10.85
		2020	0.65	90.65	2.47	10.07
67	PT BPRS Mitra Amal Mulia	2017	1.52	41.73	4.74	12.00
		2018	0.72	54.28	5.73	8.00
		2019	0.64	91.22	6.68	9.00
		2020	0.96	87.72	1.96	7.00
68	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	2017	0.99	34.40	5.44	7.00
		2018	1.37	38.07	7.03	8.00
		2019	3.65	90.35	1.05	12.01
		2020	2.12	47.38	9.14	5.39
69	PT BPRS Gayo	2017	2.60	50.93	9.69	11.00
		2018	1.58	55.38	9.74	9.00
		2019	1.60	82.90	8.69	9.26
		2020	1.16	86.76	8.77	8.92
70	PT BPRS Syarikat Madani	2017	2.10	56.88	7.27	9.00
		2018	4.68	59.48	1.05	4.00
		2019	1.69	85.45	8.89	5.00
		2020	0.48	98.78	8.64	4.00
71	PT BPRS Dana Mulia	2017	0.99	52.92	1.39	10.00
		2018	2.48	46.26	9.17	10.00
		2019	2.75	73.67	5.81	12.50
		2020	2.84	79.57	6.57	9.48
72	PT BPRS Sukowati Sragen	2017	3.29	40.50	5.65	10.00
		2018	3.22	42.11	6.31	10.00
		2019	3.38	79.93	6.05	11.00
		2020	2.56	81.10	4.90	9.00
73	PT BPRS Dana Amanah Surakarta	2017	2.57	37.72	9.87	10.00
		2018	2.45	40.62	1.13	12.00
		2019	1.61	81.97	9.68	10.65
		2020	0.72	88.57	3.11	9.17
74	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	2017	0.04	83.26	4.41	1.00
		2018	0.08	79.08	5.90	11.00
		2019	0.88	56.75	0.00	3.00
		2020	0.16	94.66	3.03	2.42
75	PT BPRS Sarana Prima Mandiri	2017	1.23	64.72	6.47	10.00
		2018	1.66	60.56	1.22	10.00
		2019	0.39	59.51	0.88	8.10
		2020	5.99	101.81	1.44	6.77
76	PT BPRS Danagung Syariah	2017	2.71	42.23	7.28	8.00
		2018	1.99	44.88	1.43	8.00
		2019	0.69	105.98	2.46	6.00

		2020	2.38	118.49	1.20	5.34
77	PT BPRS Rajasa	2017	7.50	58.24	4.15	10.00
		2018	7.46	55.65	3.70	9.00
		2019	7.62	51.00	1.26	10.11
		2020	6.39	58.74	3.90	9.32
78	PT BPRS Kotabumi	2017	7.64	33.57	1.62	11.00
		2018	5.62	33.95	1.86	12.00
		2019	4.91	81.33	2.01	3.33
		2020	5.11	79.99	1.99	11.53
79	PT BPRS Al Makmur	2017	1.46	56.66	8.21	1.00
		2018	1.85	56.81	2.25	3.00
		2019	0.78	88.47	1.12	4.96
		2020	0.90	85.92	2.49	4.84
80	PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia	2017	4.04	39.84	3.99	10.00
		2018	4.53	35.62	3.84	11.00
		2019	4.04	63.67	3.21	9.69
		2020	1.60	76.75	3.37	4.10
81	PT BPRS FORMES	2017	1.99	51.64	7.42	8.00
		2018	2.42	64.16	5.32	5.00
		2019	5.02	96.73	3.45	3.35
		2020	1.92	81.87	1.99	1.29
82	PT BPRS Central Syariah Utama	2017	0.09	70.51	9.85	8.00
		2018	1.79	58.35	9.52	7.00
		2019	4.63	46.00	3.18	5.72
		2020	5.83	34.89	8.54	2.47
83	PT BPRS Cempaka Al Amin	2017	0.93	51.34	5.03	11.00
		2018	2.12	63.53	2.80	10.00
		2019	2.00	75.95	1.58	10.00
		2020	4.56	83.86	3.11	9.50
84	PT BPRS Madinah	2017	4.36	66.97	4.05	7.00
		2018	3.73	67.91	4.40	8.00
		2019	3.36	78.95	6.91	7.00
		2020	1.29	90.17	6.81	6.00
85	PT BPRS Lampung Timur	2017	7.86	41.39	3.53	9.00
		2018	9.48	33.60	6.16	19.00
		2019	9.34	64.00	4.53	28.03
		2020	8.07	45.04	3.14	18.10
86	PT BPRS Al Mabrur Klaten	2017	1.98	50.67	1.86	9.00
		2018	2.44	50.82	1.26	9.00
		2019	2.22	77.51	8.79	9.20
		2020	1.11	96.86	1.70	3.00
87	PT BPRS Artha Pamenang	2017	4.81	56.15	3.19	9.00
		2018	4.75	57.41	3.19	7.00
		2019	4.56	83.67	2.20	7.50
		2020	3.47	86.76	4.37	6.94

88	PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera	2017	3.53	44.06	6.38	6.00
		2018	2.25	45.53	4.63	5.00
		2019	2.31	75.88	3.69	9.68
		2020	1.30	83.78	4.62	10.17
89	PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta	2017	2.88	48.00	5.36	8.00
		2018	2.01	46.32	6.89	8.00
		2019	1.66	90.48	8.50	7.58
		2020	0.97	113.48	5.57	8.04
90	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	2017	2.28	65.17	4.60	8.00
		2018	2.75	62.80	8.41	8.00
		2019	2.00	86.00	7.00	7.63
		2020	1.30	92.21	6.75	7.62
91	PT BPRS Al Madinah Tasikmalaya	2017	0.97	63.94	9.67	7.00
		2018	1.10	75.66	7.91	6.00
		2019	3.13	74.50	9.86	6.56
		2020	1.58	88.20	5.42	7.55
92	PT BPRS Way Kanan	2017	8.94	34.69	4.31	11.00
		2018	8.22	38.79	5.68	13.00
		2019	3.69	47.35	3.03	11.00
		2020	0.14	98.92	1.19	7.32
93	PT BPRS Dharma Kuwera	2017	0.43	75.68	1.15	7.00
		2018	2.16	70.23	7.30	9.00
		2019	3.29	66.61	6.83	9.66
		2020	1.58	88.20	5.42	7.55
94	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung	2017	1.68	60.94	16.80	7.00
		2018	2.06	74.33	2.79	8.00
		2019	1.00	104.00	2.10	8.87
		2020	4.00	119.00	1.80	6.74
95	PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang	2017	3.35	64.18	5.74	6.00
		2018	3.00	60.75	5.67	8.00
		2019	3.73	72.63	3.40	7.00
		2020	4.52	74.55	3.64	7.00
96	PT BPRS Cahaya Hidup	2017	3.15	44.75	8.05	10.00
		2018	2.27	41.12	1.18	9.00
		2019	1.82	85.05	1.24	9.10
		2020	0.74	85.99	1.28	5.98
97	PT BPRS Bahari Berkesan	2017	3.42	49.60	3.83	9.00
		2018	3.40	48.40	3.69	6.00
		2019	2.90	41.21	3.01	8.74
		2020	2.92	36.65	2.15	7.03
98	PT BPRS Magetan	2017	5.87	61.85	3.83	1.00
		2018	4.47	66.16	3.31	0.31
		2019	4.60	69.40	3.18	10.00
		2020	3.38	76.39	2.74	0.60

99	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	2017	3.14	37.74	1.76	10.00
		2018	1.64	42.28	1.99	8.00
		2019	4.42	91.04	2.27	8.00
		2020	3.46	75.85	3.93	8.00
100	PT BPRS Saka Dana Mulia	2017	1.95	57.29	6.07	12.00
		2018	1.33	65.37	8.42	8.00
		2019	1.65	88.21	7.87	7.70
		2020	0.99	99.05	8.65	6.71
101	PT BPRS Mitra Agro Usaha	2017	6.49	53.31	1.01	11.00
		2018	5.36	50.92	3.38	10.00
		2019	3.73	77.91	6.57	10.32
		2020	2.81	77.32	2.31	8.20
102	PT BPRS Harta Insan Karimah Surakarta	2017	6.79	36.37	1.37	15.00
		2018	5.77	38.06	1.49	11.00
		2019	6.48	56.88	0.43	10.74
		2020	4.31	69.10	0.85	9.64
103	PT BPRS Aman Syariah	2017	0.62	62.85	7.85	12.00
		2018	2.18	57.37	9.99	12.00
		2019	2.32	80.32	5.21	8.00
		2020	1.37	85.47	5.41	6.43
104	PT BPRS Lampung Barat	2017	4.50	41.24	0.05	11.00
		2018	4.47	38.91	0.63	11.00
		2019	0.00	0.00	1.05	3.35
		2020	5.52	53.38	2.77	5.57
105	PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat	2017	0.00	44.18	1.45	11.00
		2018	4.42	46.11	3.38	12.00
		2019	2.57	46.90	2.07	12.01
		2020	2.38	73.91	4.54	10.36
106	PT BPRS Unisia Insan Indonesia	2017	2.00	49.60	0.81	7.00
		2018	0.00	47.86	1.20	6.00
		2019	1.64	90.82	0.98	8.00
		2020	0.78	98.94	3.78	4.67
107	PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera	2017	0.00	98.99	0.88	9.00
		2018	3.00	52.89	3.66	7.00
		2019	2.69	74.11	2.73	6.60
		2020	4.10	42.30	0.13	4.00

Sumber: Data penelitian, 2021.

B. Pembuktian Hipotesis

1. Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data yang merujuk pada nilai rata-rata (*mean*), dan deviasi standar dari masing-masing variabel. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, BOPO, dan NPF selama periode 2017-2020. Sedangkan, variabel terikat pada penelitian ini yaitu tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* selama periode 2017-2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
TBH	8.4617	3.89493	428
ROA	2.7676	1.96367	428
BOPO	66.4460	20.28453	428
NPF	4.1760	2.76673	428

Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan data pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa N atau jumlah data yaitu 428 yang diperoleh dari laporan keuangan 107 BPRS selama 4 tahun ($107 \times 4 = 428$).

Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) variabel tingkat bagi hasil yaitu sebesar 8.4617 dan deviasi standar sebesar 3.89493. Nilai rata-rata

variabel ROA adalah 2.7676 dan deviasi standar sebesar 1.96367. Nilai rata-rata variabel BOPO adalah 66.4460 dengan deviasi standar sebesar 20.28453, dan nilai rata-rata variabel NPF adalah 4.1760 dan deviasi standar sebesar 2.76673.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi dengan cara melihat normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Model regresi linear dapat dikatakan sebagai model yang baik ketika memenuhi uji asumsi klasik yaitu data residual harus berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi multikolinieritas serta tidak terjadinya autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. berdistribusi normal atau tidak pada model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik apabila data berdistribusi secara normal atau mendekati normal. Normalitas dapat diketahui dengan mengamati grafik histogram atau grafik P-Plot. Grafik distribusi dengan menggunakan normal P-P plot pada SPSS merupakan salah satu cara untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.¹¹²

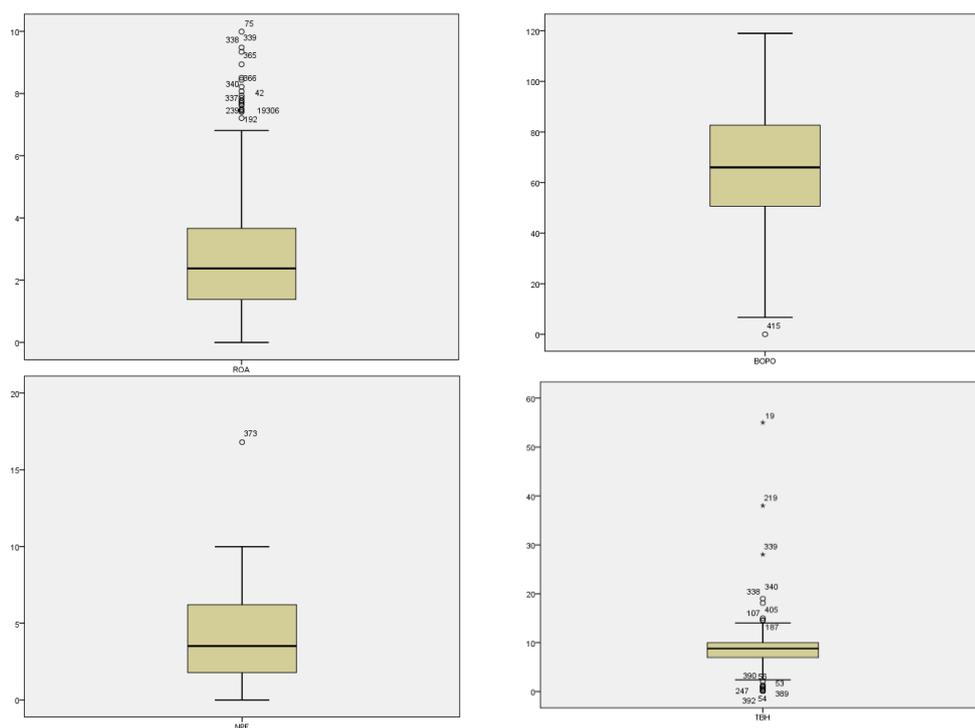
Setelah dilakukan uji asumsi klasik, data penelitian ini ditemukan terjadi pelanggaran pada uji normalitas sehingga harus dilakukan pengobatan normalitas

¹¹² Umar, *Metode Penelitian*, 181.

error dengan metode *outlier boxplot* yaitu menghapus data yang memiliki nilai ekstrim. Adapun proses penghapusan data ekstrim dengan metode *outlier boxplot* terlampir. Metode *outlier boxplot* atau diagram kotak garis merupakan penyajian gambaran data dengan menggunakan data berupa nilai minimum, nilai maksimum, nilai median, nilai Q1 dan nilai Q3 dalam bentuk horizontal maupun vertikal.¹¹³

Proses penghapusan data *outlier* dijabarkan melalui gambar-gambar berikut :

Gambar 4.1
Proses Awal Pengobatan Uji Normalitas



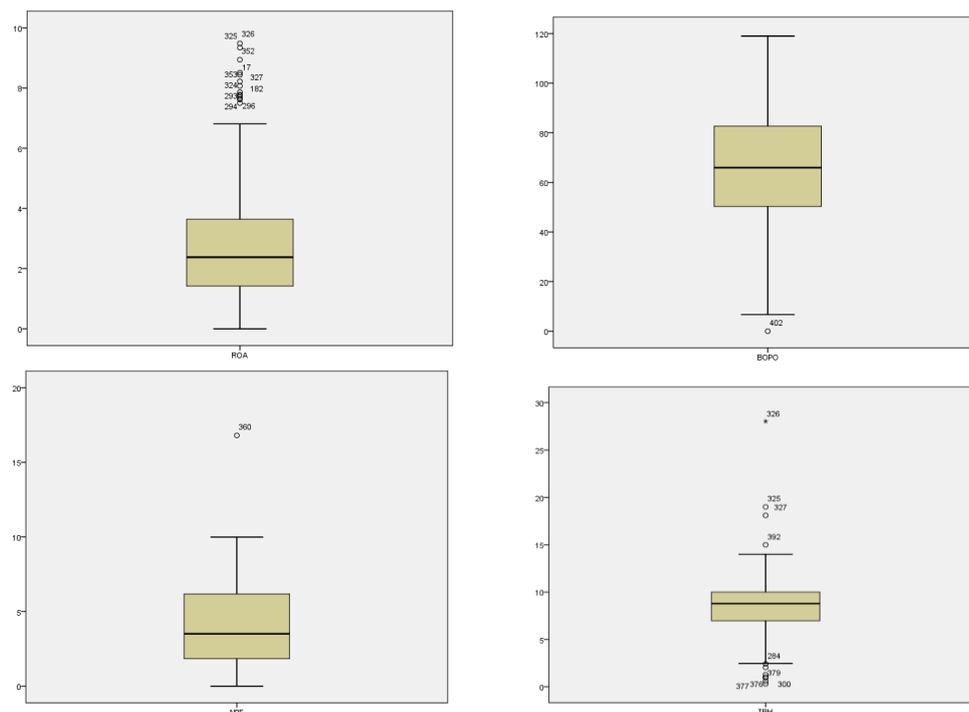
Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah)

¹¹³ Riyanto dan Uka Wikarya, *Statistika Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 25.

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa terdapat data awal yang bernilai ekstrim yaitu variabel ROA sebanyak 12 data, variabel BOPO sebanyak 1 data, variabel NPF sebanyak 1 data dan variabel Tingkat Bagi Hasil sebanyak 15 data. Sehingga data-data tersebut harus dilakukan penghapusan sebagai upaya pemenuhan uji normalitas.

Setelah dilakukan proses penghapusan data *outlier* pada gambar 4.1 maka menghasilkan output SPSS berikut :

Gambar 4.2
Proses *Outlier Boxplot* ke-1



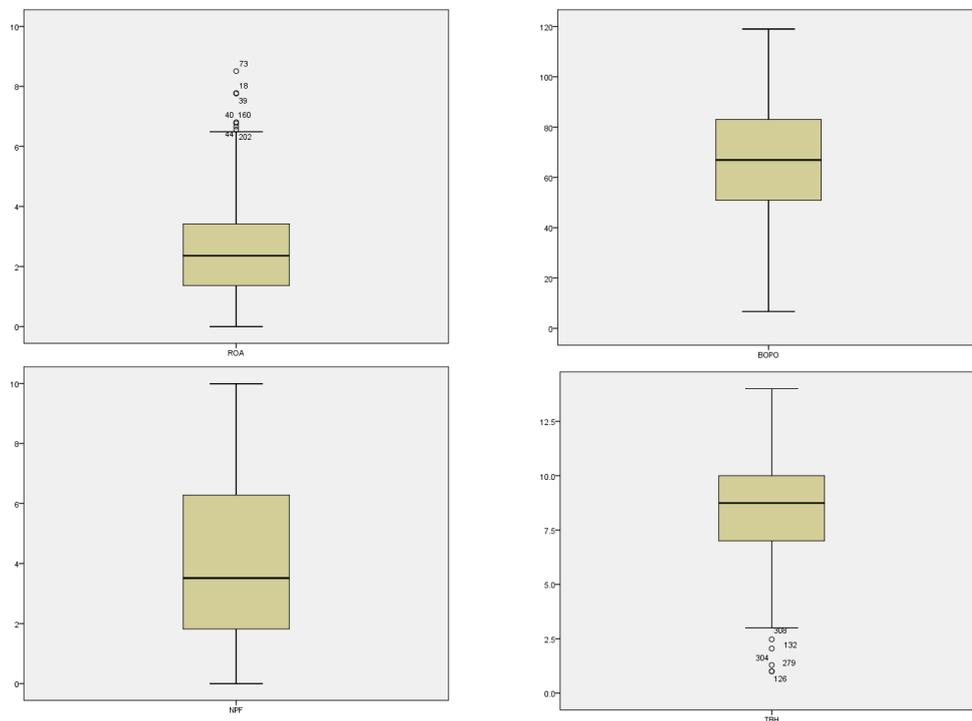
Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah)

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa masih terdapat data yang bernilai ekstrim yaitu variabel ROA sebanyak 10 data, variabel BOPO sebanyak 1 data, variabel NPF sebanyak 1 data dan variabel Tingkat Bagi Hasil sebanyak 9 data.

data. Sehingga data-data tersebut harus dilakukan penghapusan sebagai upaya pemenuhan uji normalitas.

Setelah dilakukan proses penghapusan data *outlier* pada gambar 4.2 maka menghasilkan output SPSS berikut :

Gambar 4.3
Proses *Outlier* Boxplot ke-2

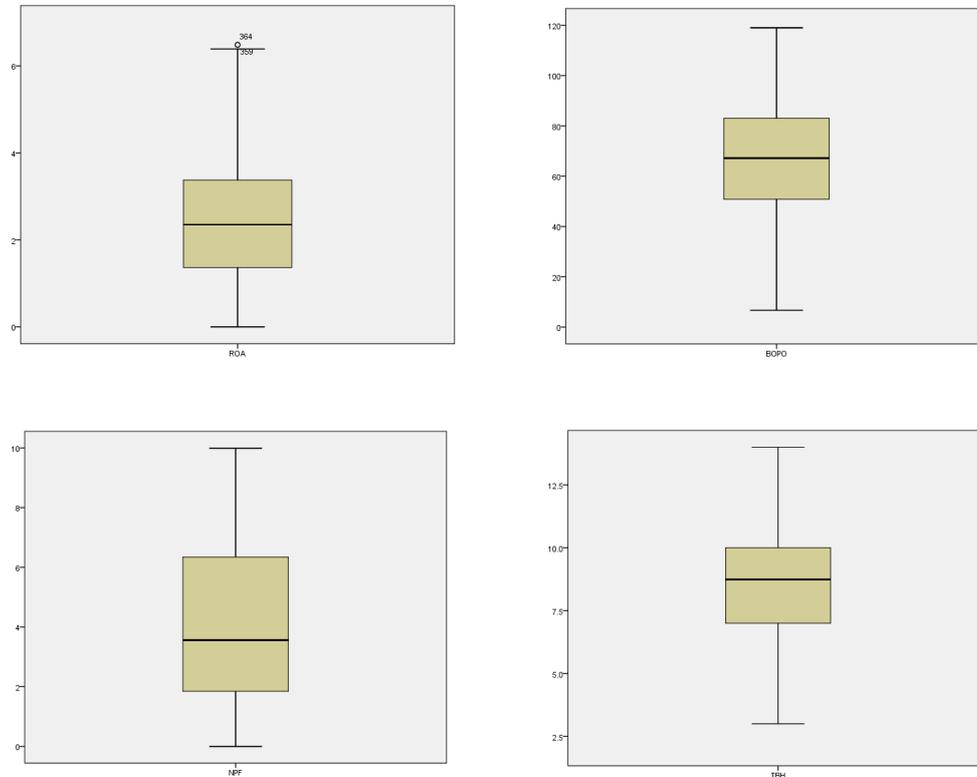


Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah)

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa masih terdapat data yang bernilai ekstrim yaitu variabel ROA sebanyak 7 data dan variabel Tingkat Bagi Hasil sebanyak 5 data. Sehingga data-data tersebut harus dilakukan penghapusan sebagai upaya pemenuhan uji normalitas.

Setelah dilakukan proses penghapusan data *outlier* pada gambar 4.3 maka menghasilkan output SPSS berikut :

Gambar 4.4
Proses *Outlier Boxplot* ke-3

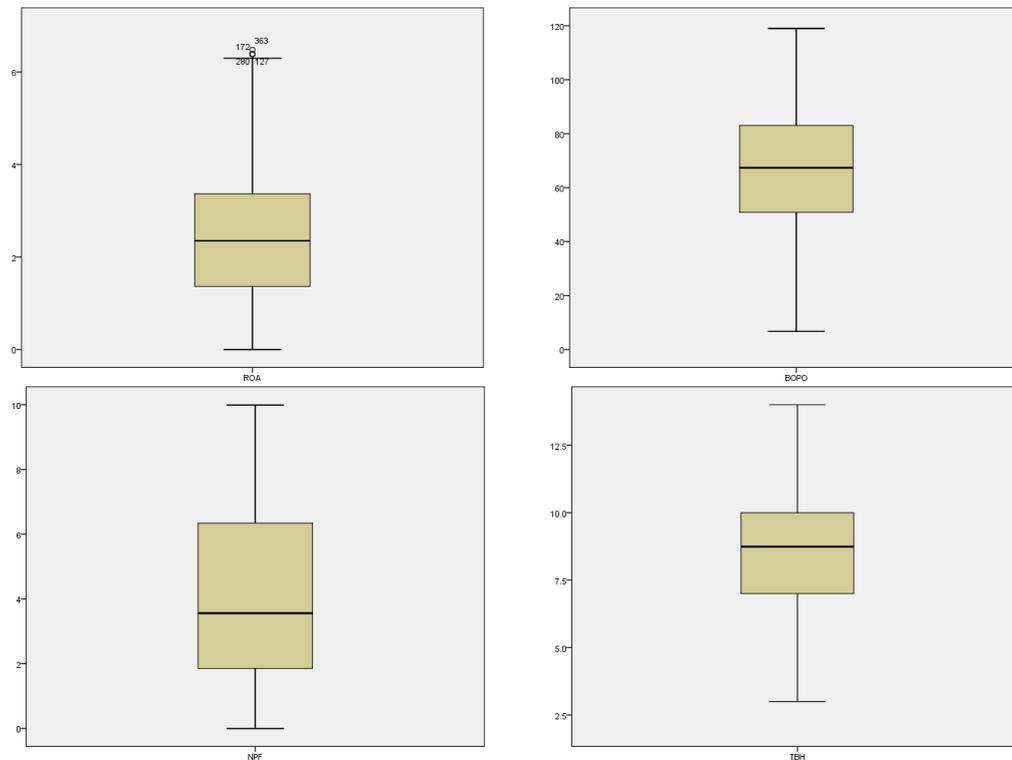


Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah)

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa masih terdapat data yang bernilai ekstrim yaitu variabel ROA sebanyak 2 data. Sehingga data-data tersebut harus dilakukan penghapusan sebagai upaya pemenuhan uji normalitas.

Setelah dilakukan proses penghapusan data *outlier* pada gambar 4.4 maka menghasilkan output SPSS berikut :

Gambar 4.5

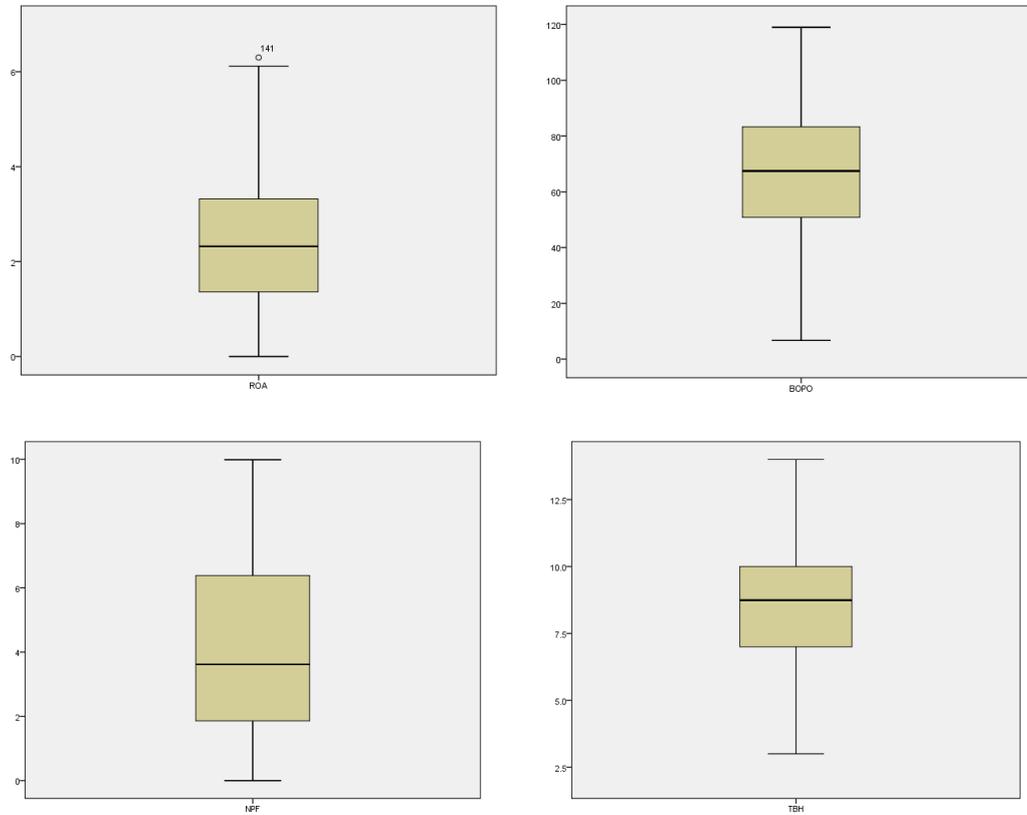
Proses *Outlier Boxplot* ke-4

Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah)

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa masih terdapat data yang bernilai ekstrim yaitu variabel ROA sebanyak 2 data. Sehingga data-data tersebut harus dilakukan penghapusan sebagai upaya pemenuhan uji normalitas.

Setelah dilakukan proses penghapusan data *outlier* pada gambar 4.5 maka menghasilkan output SPSS berikut :

Gambar 4.6
Proses *Outlier Boxplot* ke-5

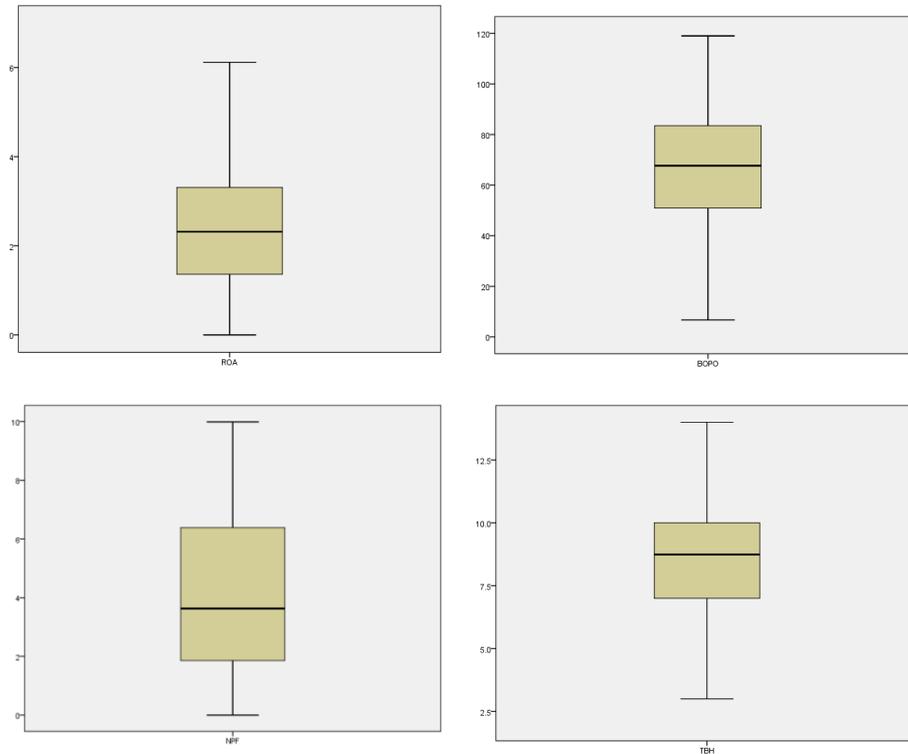


Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah)

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa masih terdapat data yang bernilai ekstrim yaitu variabel ROA sebanyak 1 data. Sehingga data-data tersebut harus dilakukan penghapusan sebagai upaya pemenuhan uji normalitas.

Setelah dilakukan proses penghapusan data *outlier* pada gambar 4.6 maka menghasilkan output SPSS berikut :

Gambar 4.7
Proses *Outlier Boxplot* Terakhir (ke-6)



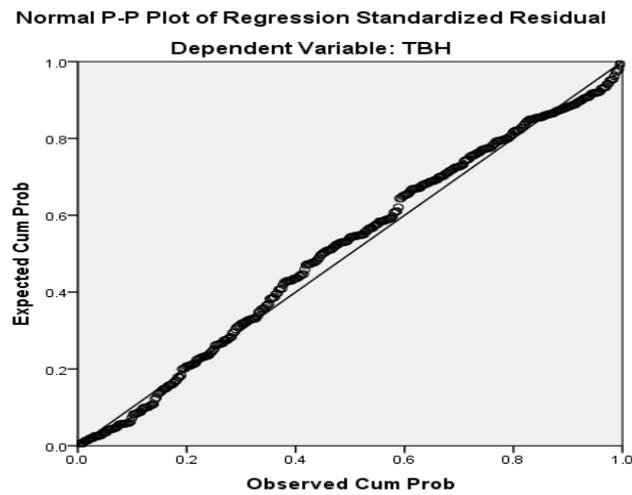
Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah)

Berdasarkan proses penghapusan data *outlier* yang dilakukan sebanyak 6 kali, maka pada penelitian ini tidak terdapat data yang bernilai ekstrim dan mengakibatkan pelanggaran uji normalitas. Oleh karena itu, setelah penghapusan sebanyak 50 data secara kumulatif, maka jumlah data penelitian ini menjadi sebesar 378 data.

Untuk mengetahui normalitas pada penelitian ini, peneliti menggunakan Grafik P-Plot berdasarkan data setelah pengobatan uji normalitas dengan ketentuan data residual harus menyebar di sekitar garis diagonal atau mendekati garis diagonal. Adapun uji normalitas menggunakan grafik P-Plot sebagai berikut

:

Gambar 4.8
Grafik Normal P-Plot



Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah)

Berdasarkan grafik *normal probability plot* (P-Plot) di atas setelah dilakukan proses penghapusan data ekstrim sejumlah 50 data sebanyak 6 kali.¹¹⁴ Grafik di atas mengindikasikan bahwa data (titik-titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas pada model regresi.¹¹⁵ Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas yaitu dengan cara mengamati nilai *tolerance* yang mana harus lebih dari 0.1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Adapun hasil uji multikolinieritas penelitian ini sebagai berikut:

¹¹⁴ Proses penghapusan data *outlier* terlampir.

¹¹⁵ Riyanto dan Uka Wikarya, *Statistika Ekonomi*, 177-179.

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	ROA	.890	1.124
	BOPO	.893	1.119
	NPF	.992	1.008

Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah)

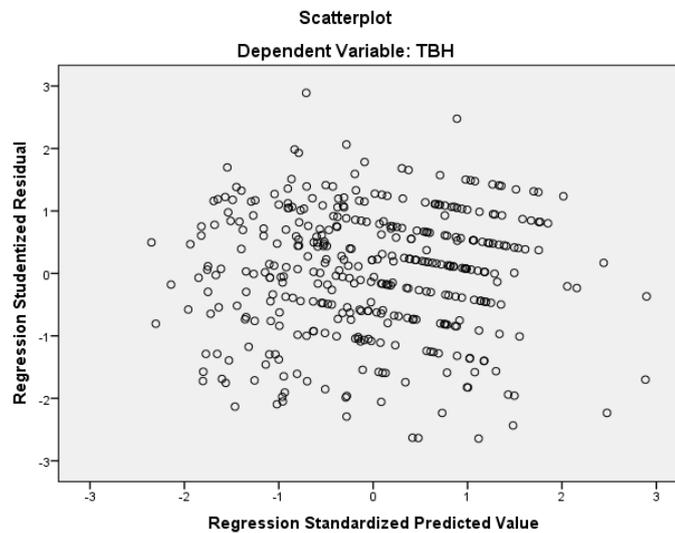
Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa nilai *tolerance* dari variabel ROA, BOPO, dan NPF berturut-turut yaitu 0.890, 0.893, dan 0.992. nilai tersebut melebihi dari 0.100 dan nilai VIF dari variabel ROA, BOPO, dan NPF berturut-turut yaitu 1.124, 1.119, dan 1.008 yang mana kurang dari 10.00. Maka demikian, penelitian ini dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk pengujian ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain pada model regresi.¹¹⁶ Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian maka peneliti menggunakan grafik scatterplot dengan ketentuan tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot sebagai berikut :

¹¹⁶ Umar, *Metode Penelitian*, 179.

Gambar 4.9
Grafik Scatterplot



Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah).

Berdasarkan grafik scatterplot di atas menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik tidak dapat membentuk pola tertentu yang jelas dikarenakan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga grafik tersebut tidak dapat dibaca secara jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linear. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji durbin watson dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) $DW < dL$, berarti ada autokorelasi positif (+).
- 2) $dL < DW < dU$, tidak dapat disimpulkan.

- 3) $DW > 4-dL$, berarti ada autokorelasi negatif (-).
- 4) $4-dU < DW < 4-dL$, tidak dapat disimpulkan.
- 5) $dU < DW < 4-dU$, berarti tidak terjadi autokorelasi.

Adapun uji autokorelasi menggunakan uji durbin watson sebagai berikut :

Tabel 4.4
Uji autokorelasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.254 a	.064	.057	2.057
a. Predictors: (Constant), NPF, BOPO, ROA				
b. Dependent Variable: TBH				

Sumber : Output SPSS 24 (Data diolah).

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson pada penelitian ini yaitu 2.057. Berdasarkan k (3) dan N (378) dengan signifikansi 5%, diperoleh nilai DI sebesar 1.807 dan nilai Du sebesar 1.842. Berdasarkan output SPSS di atas diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (DW) = 2.057. Dari tabel statistik Durbin-Watson, dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah data sebesar 378 data yang merupakan jumlah data setelah proses penghapusan data bernilai ekstrim (n = 378) dan jumlah variabel independen 3 (k = 3) didapat nilai $4 - dU = 2.158$. Karena nilai Durbin-Watson model regresi berganda dalam penelitian ini berada diantara dU dan $4-dU$ ($dU < DW < 4-dU$), yaitu $1.842 < 2.057 < 2.158$, maka dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan prosedur yang menghasilkan sebuah keputusan yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis.¹¹⁷ Uji hipotesis pada model regresi linear digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan.

a. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat akibat pengaruh dari nilai variabel bebas.¹¹⁸ Analisis regresi berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel bebas (*independent*) yaitu ROA, BOPO, dan NPF terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*. Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Independen (Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*)

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi dari ROA, BOPO, dan NPF

X_1 = ROA

X_2 = BOPO

X_3 = NPF

e = Error

¹¹⁷ Hasan, *Analisis Data*, 34.

¹¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 277.

Tabel 4.5
Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.927	.541	18.341	.000		
	ROA	.068	.080	.847	.397	.890	1.124
	BOPO	-.026	.006	-4.443	.000	.893	1.119
	NPF	-.013	.040	-.337	.737	.992	1.008

a. Dependent Variable: TBH

Sumber: Output SPSS 24 (Data diolah).

Analisis regresi linear berganda pada tabel di atas diperoleh koefisien variabel ROA = 0.068 (X1), koefisien variabel BOPO = -0.026 (X2), dan koefisien variabel NPF = -0.013 (X3) dengan konstanta (a) sebesar 9.927.

Adapun model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 9.927 + 0.068X1 - 0.026X2 - 0.013X3 + e$$

Model persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

$\alpha = 9.927$. Angka ini merupakan angka yang bersifat konstan yang mana mempunyai arti bahwa jika tidak ada ROA, sehingga nilai konsisten tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar 9.927.

$b_1 = 0.068$. Angka ini mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1% ROA, sehingga tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* akan meningkat sebesar 0.0068.

$b_2 = -0.026$. Angka ini mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1% BOPO maka tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* akan meningkat sebesar -0.026.

$b_3 = -0.013$. Angka ini mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1% NPF, maka tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* akan meningkat sebesar -0.013.

Karena nilai koefisien regresi (a) bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa ROA, BOPO, dan NPF berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Arah koefisien regresi bernilai positif bermakna bahwa semakin tinggi ROA, BOPO, dan NPF maka akan semakin meningkatkan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

b. Uji t

Uji t dalam penelitian ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel *independent* ROA, BOPO, dan NPF terhadap *variable dependent* yaitu tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Adapun kriteria pengujian dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apabila nilai $\text{sig} < 0.05$, maka H_0 ditolak
- 2) Apabila nilai $\text{sig} > 0.05$, maka H_0 diterima,¹¹⁹ dan
- 3) H_0 diterima (H_a ditolak) apabila $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$.
- 4) H_0 ditolak (H_a diterima) apabila nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$.¹²⁰

Adapun output SPSS mengenai hasil uji t hitung dijabarkan pada tabel berikut:

¹¹⁹ Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, 300.

¹²⁰ Hasan, *Analisis Data*, 104.

Tabel 4.6
Uji t

Coefficients ^a						
Model		t	Sig.	Correlations		
				Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	18.341	.000			
	ROA	.847	.397	.122	.044	.042
	BOPO	-4.443	.000	-.249	-.224	-.222
	NPF	-.337	.737	-.014	-.017	-.017
a. Dependent Variable: TBH						

Sumber: Output SPSS 24 (Data diolah).

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.6 tentang uji t, dapat diketahui variabel independen (X1) yaitu ROA diperoleh t hitung sebesar 0.847 dengan taraf signifikan sebesar 0.397. Nilai t tabel untuk model regresi di atas dapat diketahui dengan perhitungan pada microsoft office excel dengan taraf signifikansi 0.05 atau 5% sehingga t tabel sebesar 1.966. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0.397 > 0.05$ dan nilai t hitung ROA $0.847 < t$ tabel ROA 1.966. Maka dapat dinyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.6 tentang uji t, dapat diketahui variabel independen (X2) yaitu BOPO diperoleh t hitung sebesar -4.443 dengan taraf signifikan sebesar 0.000. Nilai t tabel untuk model regresi di atas dapat diketahui dengan perhitungan pada *microsoft office excel* dengan taraf signifikansi 0.05 atau 5% sehingga t tabel sebesar 1.966. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dan nilai $-t$ hitung $-4.443 < -t$ tabel -1.966. Maka dapat dinyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.6 tentang uji t, dapat diketahui variabel independen (X3) yaitu NPF diperoleh t hitung sebesar -0.337 dengan taraf signifikan sebesar 0.737. Nilai t tabel untuk model regresi di atas dapat diketahui dengan perhitungan pada *microsoft office excel* dengan taraf signifikansi 0.05 atau 5% sehingga t tabel sebesar 1.966. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0.737 > 0.05$ dan nilai t hitung $-0.337 > t$ tabel -1.966. Maka dapat dinyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

c. Uji F

Uji F dalam penelitian ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh secara simultan variabel *independent* ROA, BOPO, dan NPF terhadap *variable dependent* yaitu tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Adapun kriteria pengujian yang digunakan yaitu:¹²¹

- 1) Apabila nilai sig < 0.05 , maka H0 ditolak
- 2) Apabila nilai sig > 0.05 , maka H0 diterima
- 3) H0 diterima (Ha ditolak) apabila F hitung $< F$ tabel.
- 4) H0 ditolak (Ha diterima) apabila nilai F hitung $> t$ tabel

Adapun tabel uji F pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.7
Tabel ANOVA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115.176	3	38.392	8.569	.000 ^b
	Residual	1675.687	374	4.480		

¹²¹ Siregar, *Metode Penelitian*, 304.

	Total	1790.863	377			
a. Dependent Variable: TBH						
b. Predictors: (Constant), NPF, BOPO, ROA						

Sumber: Output SPSS 24 (Data diolah).

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui F hitung variabel independen ROA, BOPO, dan NPF secara simultan sebesar 8.569 dengan taraf signifikan sebesar 0.000. Nilai F tabel untuk model regresi pada penelitian ini dapat diketahui dengan perhitungan pada *microsoft office excel* dengan taraf signifikansi 0.05 atau 5% sehingga F tabel sebesar 2.628. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dan nilai F hitung $8.569 > F$ tabel 2.628. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ROA, BOPO, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Adapun nilai koefisien determinasi penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.254 ^a	.064	.057	2.057
a. Predictors: (Constant), NPF, BOPO, ROA				
b. Dependent Variable: TBH				

Sumber: Output SPSS 24 (Data diolah).

Hasil statistik pada tabel 4.8 diketahui bahwa pengaruh variabel ROA, BOPO, dan NPF terhadap variabel tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu dinyatakan dengan nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan nilai *R Square* sebesar 0.064 atau 6.4%. Hasil analisis data *R Square* dapat diketahui nilai koefisien determinasi atau *R Square* sebesar 0.064 atau 6.4%. Angka tersebut mempunyai arti bahwa variabel ROA, BOPO dan NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar 6.4%. Sedangkan, sisanya (100% - 6.4% = 93.6%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam analisis model regresi pada penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaruh ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2020. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi ROA jauh lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.397. Maka demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa jika nilai ROA meningkat maka tidak akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, hal tersebut bertolak belakang dengan teori yang memaparkan bahwa ketika nilai ROA semakin meningkat menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan maka akan terjadi peningkatan tingkat bagi hasil.

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hubungan antara variabel ROA dengan variabel Tingkat Bagi Hasil sebesar 0.044 atau 4.4% yang mengindikasikan bahwa hubungan tersebut dikategorikan sangat rendah, artinya variabel ROA hanya mampu mempengaruhi variabel tingkat bagi hasil sebesar 4.4%. Maka dari itu, pada penelitian ini variabel ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Meskipun demikian, hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulfiyani dan Mais yang menyimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada tahun 2019.¹²²

ROA merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, ROA tidak dapat dijadikan sebagai indikator tunggal untuk mengukur kinerja bank dan mengukur tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sehingga, kemampuan bank untuk mendapatkan laba dengan menggunakan asset, secara parsial tidak dapat dijadikan acuan tingkat bagi hasil pemilik dana pihak ketiga dengan akad *mudharabah*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Laila Harfiah yang menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, namun dikarenakan faktor objek penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang.¹²³

Setiap BPRS memiliki kebijakan masing-masing untuk menentukan tingkat bagi hasil yang ditetapkan. Selain itu, setiap BPRS juga memiliki

¹²² Nia Sulfiyani dan Rimi Gusliana Mais, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012–2018," *Jurnal STEI Ekonomi* 28, no. 01 (3 Juni, 2019): 122, <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i01.263>.

¹²³ Lihat Kajian Penelitian Terdahulu hlm. 16

perbedaan faktor yang dipertimbangkan mengenai kebijakan bagi hasil. Seperti halnya yang telah diuraikan pada kajian pustaka, nisbah bagi hasil merupakan salah satu faktor pertimbangan bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan faktor pertimbangan yang sering digunakan BPRS sebagai penentu kebijakan bagi hasil sesuai kesepakatan dengan nasabah. Oleh karena itu, ROA tidak memengaruhi kebijakan tingkat bagi hasil pada BPRS di Indonesia. Selain itu, terdapat BPRS yang dapat dikatakan masih baru dan memiliki nilai ROA kurang dari 0.765% yang dikategorikan lemah. Sehingga dengan adanya nilai tersebut, maka ROA tidak dijadikan sebagai faktor pertimbangan tingkat bagi hasil pada BPRS di Indonesia.

Pada akhir tahun 2019-2020 sedang terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan nilai ROA BPRS di Indonesia menurun,¹²⁴ sehingga BPRS lebih fokus dalam memperbaiki dan menjaga kualitas bagi hasil dengan pertimbangan lain selain ROA. Hal tersebut terbukti pada akhir tahun 2020, terjadi penurunan nilai ROA BPRS di Indonesia namun terjadi peningkatan tingkat bagi hasil yang sangat drastis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa BPRS di Indonesia telah mampu menjaga dan meningkatkan kualitas tingkat bagi hasil BPRS di Indonesia tanpa mempertimbangkan ROA yang dijadikan faktor langsung yang memengaruhi tingkat bagi pada BPRS di Indonesia.

¹²⁴ Lihat bab I hlm. 7

2. Pengaruh BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada BPRS Di Indonesia Periode 2017-2020

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2020. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi BOPO lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.000. Berdasarkan nilai t hitung bernilai negatif, maka demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa jika nilai BOPO meningkat maka akan mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dan berlaku sebaliknya, hal tersebut sejalan dengan teori yang memaparkan bahwa ketika nilai BOPO semakin meningkat maka akan terjadi penurunan tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabtianto dan Yusuf yang menyimpulkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.¹²⁵ Meskipun demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Nur Cahyani.

Pada teori yang diungkapkan oleh Antonio, diinterpretasikan bahwa BOPO merupakan faktor tidak langsung yang memengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.¹²⁶ Namun berdasarkan teori sebagaimana diungkapkan oleh Muhamad pada bukunya yang berjudul “Manajemen Bank Syariah” bahwa bank syariah memiliki dua faktor penentu persentase tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun bentuk faktor

¹²⁵ Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf, “Pengaruh BOPO, CAR, FDR dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *ULTIMA Accounting* 10, no. 2 (29 Januari, 2019): 169, <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i2.978>.

¹²⁶ Lihat kajian pustaka halaman 40

internal salah satunya berupa biaya operasional, pendapatan operasional dan kondisi internal lainnya.¹²⁷ Oleh karena itu, BOPO merupakan salah satu faktor penentu tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Tingkat bagi hasil sangat dipengaruhi oleh pendapatan operasional dan biaya operasional karena pada dasarnya jumlah rupiah yang akan diterima nasabah ditentukan oleh pendapatan yang dihasilkan dari dana terhimpun yang dikelola oleh bank. Ketika pendapatan yang diperoleh bank semakin meningkat dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank semakin menurun atau BOPO semakin menurun maka akan mengakibatkan peningkatan tingkat bagi hasil.¹²⁸

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia. Hal tersebut merupakan sebuah pengaruh yang baik dan selaras dengan karakter BOPO yang berkaitan dengan beban operasional jika beban operasional semakin ditekan maka lembaga tersebut memiliki kinerja yang semakin baik. Karakter BOPO dalam kinerja keuangan yaitu semakin turun nilai BOPO maka semakin bagus lembaga tersebut, dalam penelitian ini yaitu BPRS di Indonesia.

Nilai BOPO dapat dijadikan sebagai faktor penentu tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia, namun juga harus ditambahkan faktor lain sebagai penguat. Berdasarkan tabel 4.6, diketahui nilai *correlation partial* variabel BOPO sebesar -0.224 atau 22.4% , hal ini dikategorikan sebagai hubungan yang rendah antara variabel BOPO dengan variabel tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Selain itu juga diperkuat berdasarkan nilai koefisien

¹²⁷ Lihat kajian pustaka halaman 42

¹²⁸ Lihat kajian pustaka halaman 30

determinasi hasil penelitian ini sebesar 6.4% yang dikategorikan sangat rendah untuk mendefinisikan variabel tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional memengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* dengan persentase rendah dan bersifat negatif berdasarkan nilai t hitung penelitian ini.

3. Pengaruh NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2017-2020. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi NPF jauh lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu 0.737. Maka demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa jika nilai NPF meningkat maka tidak akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, hal ini diperkuat pada tabel 4.6 diketahui nilai *correlation partial* sebesar -0.017 atau 1.7% yang dikategorikan sebagai hubungan yang sangat rendah antara variabel NPF dengan variabel tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Hasil pengujian pada penelitian ini bertolak belakang dengan teori yang memaparkan bahwa ketika nilai NPF semakin meningkat maka akan terjadi penurunan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah dikarenakan terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulfiyani dan Mais

yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada tahun 2019.¹²⁹

NPF merupakan rasio risiko pembiayaan oleh perusahaan atau bank. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, NPF tidak dapat dijadikan sebagai indikator tunggal untuk mengukur tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berdasarkan rasio risiko pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan pihak bank telah melakukan analisis risiko dan memiliki strategi yang baik dalam menghadapi risiko pembiayaan yang cukup tinggi. Seperti halnya pada tahun 2019. BPRS di Indonesia telah melakukan restrukturisasi pembiayaan guna mengatasi tingginya NPF sehingga tidak memengaruhi pada kualitas tingkat bagi hasil pada BPRS Indonesia, hal tersebut dapat dikatakan efisien dalam mengontrol penurunan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sehingga sesuai dengan hasil penelitian ini yang menyimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Iryana Sofiyani yang menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh secara positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.¹³⁰

Nilai NPF bisa dikendalikan dengan berbagai metode penanganan risiko pembiayaan seperti halnya restrukturisasi yang telah dilakukan BPRS untuk tetap menjaga agar NPF atau pembiayaan bermasalah tidak memengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Sehingga, berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa NPF atau risiko pembiayaan tidak memengaruhi terhadap tingkat bagi

¹²⁹ Sulfiyani dan Mais, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012–2018," 122.

¹³⁰ Sofiyani, "Analisis Pengaruh ROA, BOPO, FDR, CAR dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2012-2016," 84.

hasil deposito *mudharabah*. Hal ini didukung oleh nilai signifikansi NPF pada hasil penelitian ini.

4. Pengaruh ROA, BOPO, dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Depsoito *Mudharabah* Pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa ROA, BOPO, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Bagi Hasil Depsoito *Mudharabah* Pada BPRS di Indonesia Periode 2017-2020. Hal tersebut dikarenakan nilai signifikansi ROA, BOPO, dan NPF secara jauh lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0.000. Berdasarkan nilai uji F sebesar 8.569 yang mana lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2.628 Maka demikian, hasil pada penelitian ini mengindikasikan ketika nilai ROA, BOPO, dan NPF meningkat bersamaan maka akan mengakibatkan kenaikan yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, jika dilihat dari hasil uji, maka rasio keuangan yang memegang peran utama antara ketiga variabel tersebut yaitu BOPO dengan nilai signifikansi sebesar 0.000.

ROA, BOPO dan NPF merupakan rasio keuangan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur peningkatan atau penurunan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, namun juga harus ditambah dengan rasio lainnya untuk mengukur kinerja keuangan BPRS sehingga akan mampu mewakili persentase tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Berdasarkan rendahnya angka koefisien determinasi yaitu sebesar 6.4%, dapat dikatakan bahwa terdapat faktor eksternal dan faktor internal lainnya yang harus diukur untuk mengetahui persentase tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* secara 100%.

Berdasarkan hasil pengujian, ROA, BOPO dan NPF berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika persentase ROA, BOPO dan NPF bersamaan meningkat maka akan mengakibatkan kenaikan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan ketika terjadi penurunan persentase ROA, BOPO dan NPF secara bersamaan maka akan mengakibatkan penurunan tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal tersebut sesuai dengan teori Muhamad bahwa ROA, BOPO, dan NPF merupakan faktor internal yang memengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*. Meskipun demikian, ada faktor internal dan faktor eksternal lainnya yang harus diukur untuk mengetahui pengaruh yang lebih signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.